



PERUBAHAN RENSTRA

(Rencana Strategis)

2017 - 2022



INSPEKTORAT

Pemerintah Daerah Kota Cimahi

KATA PENGANTAR

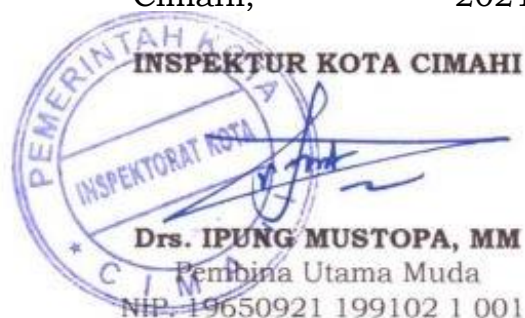
Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Cimahi periode 2017-2022 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Inspektorat periode 2012-2017, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (*stakeholders*) Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), analisa terhadap dinamika perubahan yang terjadi dalam masa melaksanakan program dan kegiatan Inspektorat.

Dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal, terutama dengan adanya berbagai perubahan kebijakan maupun kebijakan baru Pemerintah Pusat serta kondisi Indonesia saat ini yang juga sangat berpengaruh pada pembangunan Kota Cimahi, maka perlu dilakukan perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan rencana pembangunan, maka perubahan RPJMD diikuti dengan perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Perubahan Rencana Strategis 2017-2022 sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Cimahi sebagaimana diamanatkan pada Perubahan RPJMD 2017-2022.

Penyusunan Perubahan Renstra ini merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Inspektorat Kota Cimahi dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan, yang dituangkan dalam program kerja tahunan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Berkaitan dengan hal tersebut, semua unit kerja APIP harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian visi Wali Kota Pemerintah Daerah Kota Cimahi periode 2017-2022 yaitu **“Mewujudkan Cimahi Baru, Maju, Agamis dan Berbudaya”**, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun.

Cimahi,

2021



INSPEKTUR KOTA CIMAH
INSPEKTORAT KOTA
Drs. IPUNG MUSTOPA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650921 199102 1 001



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	<i>i</i>
DAFTAR ISI.....	<i>ii</i>
DAFTAR TABEL.....	<i>iii</i>
DAFTAR GAMBAR.....	<i>iv</i>
BAB I	PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA CIMAHI
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	11
2.2. Sumber Daya Inspektorat Kota Cimahi.....	24
2.2.1. Sumber Daya Aparatur.....	24
2.2.2. Sumber Daya berupa Aset.....	27
2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Cimahi.....	28
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kota Cimahi.....	68
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	71
3.2. Visi, Misi Wali Kota.....	73
3.3. Isu-isu Strategis Inspektorat.....	75
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	80
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN INSPEKTORAT KOTA CIMAHI
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan.....	83
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA INSPEKTORAT KOTA CIMAHI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VIII	PENUTUP
	135
	LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Unsur-unsur capaian RPJMD tahun 2017-2022	1
2.1 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan	24
2.2 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan pada Periode 2017-2022	25
2.3 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan	25
2.4 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jumlah Pegawai	27
2.5 Pencapaian Kinerja Inspektorat Kota Cimahi Periode 2012-2017	29
2.6 Rata-rata capaian kinerja Inspektora ttahun 2012-2017	38
2.7 Pencapaian kinerja Inspektorat Kota Cimahi Periode Tahun 2017 Perubahan	48
2.8 Anggaran dan realisasi pendanaan Inspektorat Kota Cimahi periode 2012-2017	55
2.9 Persentase rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi pendanaan Inspektorat tahun 2012-2017	66
3.1 Pegawai Inspektorat berdasarkan kualifikasi pendidikan	72
4.1 Tujuan dan sasaran Inspektorat tahun 2017-2022	81
5.1 Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Inspektorat	83
6.1 Rencana, program, kegiatan, dan pendanaan Inspektorat Kota Cimahi tahun 2017-2022	85
7.1 Indikator kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2017-2022	101
7.2 Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan	102
7.3 Realisasi rencana program prioritas	



DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar	2.1. Bagan struktur organisasi dari Inspektorat Kota Cimahi	23
Gambar grafik	2.2. Persentase rata-rata rasio capaian kinerja Inspektorat Kota Cimahi tahun 2012-2017	39
Gambar grafik	3.1. Pegawai Inspektorat berdasarkan kualifikasi pendidikan	72
Gambar	3.2. Hasil nilai evaluasi SAKIP tahun 2016-2017	76
Gambar	3.3. Capaian kapabilitas APIP Pemda di Jawa Barat tahun 2017	76
Gambar	3.4. Skor maturitas SPIP Pemda di Jawa Barat tahun 2017	77
Gambar	3.5. IPK rata-rata Indonesia tahun 2017	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kota Cimahi kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dokumen tersebut menjadi komitmen Kepala Daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang telah dicanangkan dalam *political planning* Kepala Daerah terpilih.

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Wali Kota, maka Perubahan Renstra Inspektorat bersinergi dengan Perubahan RPJMD Pemerintah Kota Cimahi. Misi 2 Wali Kota menjelaskan unsur-unsur capaian Perubahan RPJMD yang akan bersinergi dengan Perubahan Renstra Inspektorat dijelaskan dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1

Unsur-unsur Capaian Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022

Misi 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik	
Unsur-unsur capaian Perubahan RPJMD	
Tujuan	: Meningkatkan tata kelola Pemerintah Daerah
Indikator tujuan	: Indeks reformasi birokrasi
Sasaran	: - Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah - Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah
Indikator sasaran	: - Nilai Sakip - Opini BPK
Strategi	: Peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik
Program pembangunan daerah	: - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi - Program Penyelenggaraan Pengawasan
Indikator kinerja	: - Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi LKIP kategori BB - Nilai maturitas SPIP

Rumusan Perubahan RENSTRA Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2017-2022 diantaranya diselaraskan dengan 21 program prioritas pembangunan

dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022, terutama dalam menentukan tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, dan strategi program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang lebih terukur dan berorientasi hasil (*outcome*).

Keselarasan RPJMD dengan Renstra menjadi faktor penting dalam mencapai visi dan misi Wali Kota dan target-target kinerja Inspektorat melalui pengawasan Internal Pemerintah Daerah.

Hasil evaluasi Renstra Inspektorat Tahun 2012-2017 menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan masih berbasis output dengan prinsip "*Money follows function*". Sedangkan untuk Renstra Inspektorat Tahun 2017-2022 merupakan tantangan dalam mencapai target kinerja dengan prinsip "*Money follow program*", sehingga alokasi anggaran digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Perubahan Renstra tahun 2017-2022 akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), bersih, dan terukur ke arah kebijakan pencegahan potensi dan praktek-praktek KKN, peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan, serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Perubahan paradigma Inspektorat saat ini, yang awalnya sebagai pemeriksa (*Watchdog*), menjadi *Catalyst* kepada seluruh Perangkat Daerah yaitu dengan menjalankan pengawasan sebagai *Quality Assurance* atau penjamin mutu, *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi, serta *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal.

Meningkatkan metode dan sistem pengawasan internal menjadi penting untuk menyempurnakan dan mengefektifkan pengawasan dan audit. Didukung dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) yang efektif dan akuntabel, dan pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan di setiap Perangkat daerah guna mewujudkan aparatur yang bersih.

Maka pengawasan internal pemerintah daerah harus direncanakan secara tepat, cermat, profesional, terpadu serta berkesinambungan yang dirumuskan dalam Perubahan Renstra Tahun 2017-2022, agar target tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kota Cimahi tercapai, sebagaimana

tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

1.2. Landasan Hukum

Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas Inspektorat Kota Cimahi berpedoman kepada landasan hukum yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;
17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
18. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
19. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
20. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
22. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016, tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;
35. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

36. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 356/1325/SJ tentang Panduan Pemantauan dan Verifikasi Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah (Aksi PPK Pemda) Tahun 2016 dan Tahun 2017;
37. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
38. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
39. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022RPJMD, (Lembaran daerah Nomor 278 Tahun 2021);
40. Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi pada Inspektorat Kota Cimahi;

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2017-2022 disusun dengan maksud memberikan arah dan pedoman bagi Inspektorat Kota Cimahi dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah yang berorientasi *outcome*.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Cimahi adalah :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani.
2. Terwujudnya aparatur yang profesional dan akuntabel, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal.
3. Tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kota Cimahi setiap tahun.

4. Tersediaya sarana pengendalian kinerja yang akan dilakukan selama lima tahun.
5. Menjamin pelaksanaan program dan kegiatan secara efisien, efektif, profesional dan akuntabel selama kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Cimahi tahun 2017 – 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, yaitu :

BAB I	: PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA CIMAHI
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Cimahi
	2.2. Sumber Daya Inspektorat Kota Cimahi
	2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Cimahi
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kota Cimahi
BAB III	: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA CIMAHI
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayan Inspektorat Kota Cimahi

- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Kota Cimahi
- 3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN INSPEKTORAT KOTA CIMAHI
 - 4.1. Visi dan Misi Inspektorat Kota Cimahi
 - 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kota Cimahi
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN INSPEKTORAT KOTA CIMAHI
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KOTA CIMAHI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
- BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA CIMAHI

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tugas Dan Fungsi Pada Inspektorat Kota Cimahi bahwa Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Maka dalam rangka akuntabilitas dan objektivitas hasil pengawasan, Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah yang melaksanakan pertanggungjawaban administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian.

Sebagai sebuah unit organisasi dalam lingkup Pemerintah Kota Cimahi, maka kelengkapan Inspektorat Kota Cimahi sebagai suatu organisasi adalah harus memiliki Susunan dan struktur organisasi Inspektorat Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 5 tahun 2021, yaitu:

a. Inspektur

Dalam pasal 2 bahwa Inspektur mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Sedangkan pasal 3 menjelaskan bahwa Inspektur menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan Koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kota; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administrative ke dalam semua unsur dilingkungan Inspektorat Daerah Kota. Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pengadministrasian kerja sama;
- b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari 2 Sub Bagian :

a) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- (1) Menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- (2) Pengoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah Kota;
- (3) Pengoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;

- (4) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- (5) Koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
- (6) Penginventarisasian hasil pengawasan;
- (7) Koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- (8) Penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- (9) Pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- (10) Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah Kota;
- (11) Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

b) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

- (1) Menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- (2) Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- (3) Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
- (4) Pelaksanaan urusan perlengkapan;
- (5) Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- (6) Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- (7) Pelaksanaan perbendaharaan;
- (8) Pelaksanaan verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
- (9) Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (10) Melaksanakan evaluasi dan monitoring sesuai dengan bidang tugasnya;
- (11) Menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Sosial, Budaya dan Aparatur.

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Sosial, Budaya dan Aparatur mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah Kota, mencakup bidang pemerintahan, sosial, budaya dan aparatur. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Sosial, Budaya dan Aparatur menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan di bidang Pemerintahan, sosial, budaya dan aparatur;
- 2) Penyelenggaraan pengkajian dan penyusunan bahan kebijakan pengawasan di bidang pemerintahan, sosial, budaya dan aparatur;
- 3) Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana-rencana pengawasan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan di bidang pemerintahan, sosial, budaya dan aparatur;
- 4) Penyelenggaraan penyusunan pedoman teknis pemeriksaan dan pemberian bimbingan teknis pengawasan di bidang pemerintahan, sosial, budaya dan aparatur;
- 5) Penyelenggaraan pengawasan internal terhadap pengelolaan dan tanggung jawab penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pemerintahan, sosial, budaya dan aparatur;

- 6) Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengawasan di bidang pemerintahan, sosial, budaya dan aparatur;
- 7) Menyelenggarakan koordinasi kegiatan tenaga fungsional dalam pelaksanaan tugas pengawasan internal di Bidang Pemerintahan, Sosial, Budaya dan Aparatur;
- 8) Menyelenggarakan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Bidang Pemerintahan, Sosial, Budaya dan Aparatur;
- 9) Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengawasan internal di Bidang Pemerintahan, Sosial, Budaya dan Aparatur;
- 10) Menyelenggarakan Evaluasi dan Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11) Menyelenggarakan koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam rangka pencegahan KKN dalam Reformasi Birokrasi;
- 12) Menyelenggarakan UPG; dan
- 13) Menyelenggarakan pengkajian dan pengembangan kinerja Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Sosial, Budaya dan Aparatur.

d. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Fisik mempunyai tugas :

- 1) Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan di bidang pembangunan fisik dan pengadaan barang dan jasa;
- 2) Menyelenggarakan pengkajian dan penyusunan bahan kebijakan pengawasan di bidang pembangunan fisik dan pengadaan barang dan jasa;
- 3) Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana-rencana pengawasan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan di bidang pembangunan fisik dan pengadaan barang dan jasa;
- 4) Menyelenggarakan penyusunan pedoman teknis pemeriksaan dan pemberian bimbingan teknis pengawasan di bidang pembangunan fisik dan pengadaan barang dan jasa;
- 5) Menyelenggarakan pengawasan internal terhadap pengelolaan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pembangunan fisik dan pengadaan barang dan jasa;

- 6) Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengawasan di bidang pembangunan fisik dan pengadaan barang dan jasa;
- 7) Menyelenggarakan koordinasi kegiatan tenaga fungsional dalam pelaksanaan tugas pengawasan internal di bidang pembangunan fisik dan pengadaan barang dan jasa;
- 8) Menyelenggarakan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang pembangunan fisik dan pengadaan barang dan jasa;
- 9) Menyelenggarakan monitoring evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengawasan internal di bidang pembangunan fisik dan pengadaan barang dan jasa;
- 10) Menyelenggarakan reviu tender pra DIPA dan reviu penyerapan realisasi anggaran dan pengadaan barang dan jasa;
- 11) Menyelenggarakan pengkajian dan pengembangan kinerja Inspektur Pembantu bidang pembangunan fisik.

e. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi, Pengelolaann Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

- 1) Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan di bidang ekonomi, pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- 2) Menyelenggarakan pengakajian dan penyusunan bahan kebijakan pengawasan di bidang ekonomi, pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- 3) Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana-rencana pengawasan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan di bidang ekonomi, pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- 4) Menyelenggarakan penyusunan pedoman teknis pemeriksaan dan pemberian bimbingan teknis pengawasan di bidang ekonomi, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 5) Menyelenggarakan pengawasan internal terhadap pengelolaan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ekonomi, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 6) Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengawasan di bidang ekonomi, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- 7) Menyelenggarakan koordinasi kegiatan tenaga fungsional dalam pelaksanaan tugas pengawasan internal di bidang ekonomi, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 8) Menyelenggarakan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang ekonomi, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 9) Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengawasan internal di bidang ekonomi, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 10) Menyelenggarakan reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
- 11) Menyelenggarakan reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah;
- 12) Menyelenggarakan pengkajian dan pengembangan kinerja Inspektur Pembantu bidang ekonomi, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

f. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga auditor dan P2UPD yang terbagi dalam beberapa kelompok tim pemeriksa memiliki tugas :

1) Auditor Pratama

- a) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit kinerja;
- b) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
- c) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit untuk tujuan tertentu;
- d) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
- e) Mendampingi atau memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
- f) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan evaluasi;
- g) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan reviu;
- h) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pemantauan;

- i) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pengawasan lain;
- j) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pemerintahan;

2) Auditor Muda

- a) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit kinerja;
- b) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek keuangan tertentu;
- c) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan tertentu;
- d) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
- e) Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
- f) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam kegiatan hasil evaluasi;
- g) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu;
- h) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pemantauan;
- i) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pengawasan lain;
- j) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi pengawasan;

3) Auditor madya

- a) Merumuskan pengorganisasian pengawasan;
- b) Merumuskan rancangan penugasan pengawasan sesuai dengan tujuan, sasaran, latar belakang dan ruang lingkup pengawasan;
- c) Melakukan pembahasan teknis pengawasan bersama user/obyek pemeriksaan;

- d) Menetapkan Program Kerja Pengawasan (PKP), Kertas Kerja Pengawasan (KKP), Notisi Hasil Pengawasan (NHP) dan Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
- e) Melakukan evaluasi hasil pengawasan;
- f) Melakukan pemaparan hasil pengawasan;
- g) Melakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan;
- h) Merumuskan kegiatan teknis pengawasan lainnya (sosialisasi, asistensi, bimbingan teknis, survey, pendidikan/latihan serta studi banding);
- i) Merumuskan hasil pengawasan sebagai bahan keterangan ahli dalam penyidikan dan atau peradilan atas aspek keuangan tertentu;
- j) Melaksanakan tugas pengawasan lainnya sesuai dengan disposisi pimpinan;

4) Pengawas Pemerintah Pertama

- a) Melakukan pengawasan kemampuan kelembagaan;
- b) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan yang meliputi: kurikulum
- c) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan yang meliputi:
 - (1) sumber daya manusia kesehatan;
 - (2) obat dan perbekalan kesehatan;
 - (3) pemberdayaan masyarakat;
- d) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan yang meliputi:
 - (1) pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
 - (2) pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri;
 - (3) pengeloan umum.
 - (4) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan yang meliputi; perhubungan darat;

- e) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial yang meliputi;
 - (1) Pembinaan bidang sosial;
 - (2) Identifikasi dan pengawasan pengawasan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - (3) Pelaporan pelaksanaan program di bidang sosial;
 - (4) Nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, keuangan dan kesetiakawanan sosial;
- f) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum yang meliputi;
 - (1) Perkotaan dan pedesaan;
 - (2) Air limbah;
 - (5) Persampahan;
 - (6) Drainase;
 - (7) Permukiman;
- g) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan, meliputi: pengelolaan pemasaran;
- h) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian, meliputi:
 - (1) tanaman pangan dan hortikultura;
 - (2) perkebunan;
 - (3) penunjang;
- i) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian, meliputi:
 - (1) usaha industri;
 - (2) perlindungan usaha insdustri;
 - (3) pemasaran;
 - (4) standarisasi;
 - (5) permodalan;
 - (6) sarana dan prasarana;

- (7) data insdutri;
- j) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan, meliputi; metrologi legal;
- k) Melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan tugas pembantu;
- l) Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas SKPD di Kabupaten/Kota;

5) Pengawas Pemerintah Muda

- a) Melakukan pengawasan umum penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) melalui;
 - (1) Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
- b) Melakukan Pengawasan Teknis Penerapan SPM/NSPK;
- c) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian terhadap:
 - (1) Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
- d) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian terhadap kesejahteraan masyarakat;
- e) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kependudukan dan catatan sipil;
- f) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan, yang meliputi: sosial budaya masyarakat;
- g) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan yang meliputi:
 - (1) kebijakan pembiayaan;
 - (2) pendidikan dan tenaga kependidikan;
- h) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan yang meliputi:

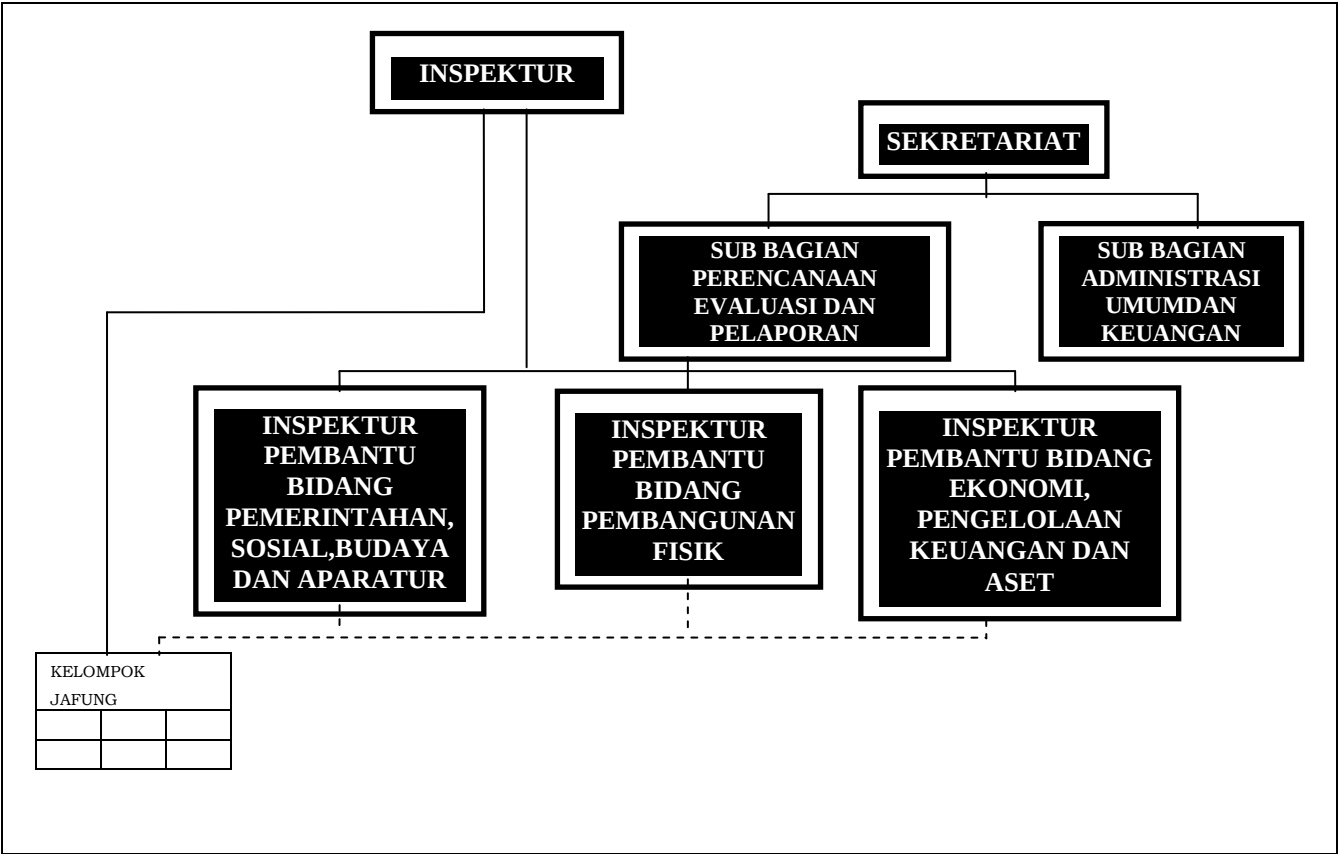
- (1) upaya kesehatan;
- (2) kebijakan pembiayaan kesehatan;
- i) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan yang meliputi: pembinaan ketenagakerjaan;
- j) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan yang meliputi: keamanan pangan;
- k) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial yang meliputi: pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial;
- l) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum yang meliputi: jasa konstruksi;
- m) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan, meliputi: umum;
- n) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian, meliputi: peternakan dan kesehatan hewan;
- o) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian, meliputi:
 - (1) perizinan;
 - (2) fasilitas industri;
 - (3) sumber daya manusia;
 - (4) kerjasama industri;
 - (5) kelembagaan;
 - (6) monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- p) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan, meliputi: perdagangan dalam negeri;
- q) Melakukan pengawasan kinerja kegiatan tugas pembantuan;
- r) Melakukan pengawasan atas indikasi penyalahgunaan wewenang

6) Pengawas Pemerintahan Madya

- a) Mengendalikan Pemeriksaan Pengadaan Barang;
- b) Mengendalikan Pemeriksaan Inventarisasi Asset;
- c) Mengendalikan Pemeriksaan Serah Terima Asset;

- d) Mengendalikan Pemeriksaan Renstra;
- e) Mengendalikan Pemeriksaan Renja;
- f) Mengendalikan Pemeriksaan RKA;
- g) Mengendalikan Pemeriksaan Renja SPM/NSPK;
- h) Mengendalikan Pemeriksaan Kebijakan Lap.Keuangan;
- i) Mengendalikan Pemeriksaan Kelembagaan;
- j) Mengendalikan Pemeriksaan Perda, Perwal;
- k) Mengendalikan Pemeriksaan Penyalahgunaan Wewenang;
- l) Mengendalikan Pemeriksaan Kecamatan;
- m) Mengendalikan Pemeriksaan Ketahanan Pangan;
- n) Mengendalikan Pemeriksaan Mutu dan Tenaga Pendidikan;
- o) Mengendalikan Pemeriksaan Perangkat Daerah;
- p) Mengendalikan Pemeriksaan Kurikulum Pendidikan;
- q) Mengendalikan Pemeriksaan Laporan AKIP;

Adapun bagan struktur organisasi dari Inspektorat Kota Cimahi dijelaskan dalam gambar 2.1.



Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi dari Inspektorat Kota Cimahi



2.2. Sumber Daya Inspektorat Kota Cimahi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian internal Inspektur Kota Cimahi didukung oleh Sumber Daya Manusia Aparatur sebagai berikut :

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur di Kota Cimahi diklasifikasikan berdasarkan golongan, pendidikan, diklat yang diikuti, dan jumlah pegawai dalam jabatan struktural, fungsional (JFA dan P2UPD), dan pelaksana yang dijelaskan dalam tabel 2.1, tabel 2.2, tabel 2.3, tabel 2.4.

Tabel 2.1
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan

Golongan IV :

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH (Orang)		JUMLAH TOTAL (Orang)
		L	P	
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	2	3
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	2	2	4
3	Pembina (IV/a)	1	2	3
JUMLAH		3	6	10

Golongan III :

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH (Orang)		JUMLAH TOTAL (Orang)
		L	P	
1	Penata Tingkat I (III/d)	2	7	9
2	Penata (III/c)	1	3	4
3	Penata Muda Tingkat I (III/b)	0	2	2
4	Penata Muda (III/a)	2	1	3
JUMLAH		5	13	18

Golongan II :

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH (Orang)		JUMLAH TOTAL (Orang)
		L	P	
1	Pengatur Tingkat I (II/d)	2	1	3
2	Pengatur (II/c)	1		1
JUMLAH		3	1	4

Tabel 2.2
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan pada Periode 2017-2022

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)		JUMLAH TOTAL (Orang)
		L	P	
1	Pasca Sarjana (S2)	4	7	11
2	Sarjana (S1)	8	9	17
3	Program Diploma (D3)	1	1	2
4	SMA	2		2
JUMLAH		15	17	32

Tabel 2.3
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan

Diklat Struktural :

NO	NAMA DIKLAT	JENIS DIKLAT		JUMLAH
		FUNGSIONAL	TEKNIS	
1	Auditor Terampil	✓		2
2	Auditor Ahli	✓		1
3	Audit perencanaan	✓		1
4	Teknik Audit Pembukuan dan APBD		✓	1
5	Teknik Penulisan Abstrak		✓	1
6	Analisis Manajemen		✓	1
7	Pengadaan Barang dan Jasa		✓	3
8	Penyelenggaraan SPIP Integratif		✓	7
9	Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		✓	6
10	Teknik Jalan dan manajemen Kabupaten		✓	1
11	Manajemen Proyek		✓	1
12	Penanganan Jalan dan Jembatan		✓	1
13	Teknik dan manajemen Perencanaan Pembangunan Tingkat Dasar		✓	1
14	Teknik fungsional manajemen proyek pemerintah provinsi daerah jabar		✓	1
15	Teknis anggaran kinerja bagi pemimpin pelaksana kegiatan pemkot cimahi TA 2014		✓	1
16	Standar akuntansi pemerintah pusat/daerah (PP No.24/2005)		✓	1
17	BLU		✓	1
18	Pencegahan persekongkolan/KKN Pelelangan Nasional dan Pengadaan jasa konstruksi serta pengadaan barang/jasa pemerintah		✓	1
19	Teknis penatausahaan keuangan bagi pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)		✓	1
20	Pengawasan pengadaan barang		✓	1

NO	NAMA DIKLAT	JENIS DIKLAT		JUMLAH
		FUNGSIONAL	TEKNIS	
	dan jasa pemerintah			
21	Bendahara Daerah		✓	1

Fungsional Auditor :

NO	NAMA DIKLAT	JENIS DIKLAT		JUMLAH
		FUNGSIONAL	TEKNIS	
1	Auditor Ahli	✓		1
2	Auditor Muda/Ketua TIM	✓		1
3	Audit sektor public		✓	1
4	Audit pengadaan barang dan jasa dengan probity audit		✓	1
5	PPNS	✓		1
6	Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) berbasis akrual berdasarkan Permendagri 64/2013		✓	1
7	Pengadaan Barang dan Jasa		✓	12
8	Penyelenggaraan SPIP Integratif		✓	11
9	Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		✓	11
10	Teknis anggaran kinerja bagi pemimpin pelaksana kegiatan pemkot cimahi TA 2014		✓	1
11	Teknis penatausahaan keuangan bagi pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)		✓	1
12	Pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah		✓	3
13	Reviu laporan keuangan		✓	1
14	SPIP		✓	2
15	Penatausahaan keuangan daerah		✓	1
16	Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dengan SIMDA		✓	2
17	Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah		✓	1
18	Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pemahaman akuntansi daerah		✓	1
19	Penyusunan kontrak dan dokumen barang dan jasa pemerintah		✓	1

Diklat Fungsional P2UPD

NO	NAMA DIKLAT	JENIS DIKLAT		JUMLAH
		FUNGSIONAL	TEKNIS	
1	Auditor Terampil	✓		1
2	Auditor Ahli	✓		1
3	Auditor Muda/Ketua TIM	✓		1
4	Audit perencanaan		✓	1

NO	NAMA DIKLAT	JENIS DIKLAT		JUMLAH
		FUNGSIONAL	TEKNIS	
5	Pengadaan Barang dan Jasa,		✓	6
6	Penyelenggaraan SPIP Integratif		✓	6
7	Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		✓	6
8	Manajemen Proyek		✓	1
9	Pimpinan madya Lemhanas	✓		1
10	Pembentukan Pengawas Pemerintahan	✓		6
11	Statistik computer		✓	1
12	Kebocoran air minum		✓	
13	Pengelolaan air bawah tanah		✓	1
14	Perhubungan darat		✓	1
15	Reviu laporan keuangan		✓	1
16	SPIP			3
17	Fungsional Penilaian angka Kredit (PAK)	✓		3
18	Reviu keuangan daerah		✓	3
19	TP-TGR			1
20	Pendidikan dan pelatihan pengawas pemerintahann	✓		1
21	Audit barang dan jasa			1

Tabel 2.4
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jumlah Pegawai

NO	JABATAN	JENIS JABATAN	JUMLAH (Orang)
1	Struktural	Inspektur	1
		Sekretaris	1
		Inspektur Pembantu	3
		Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	1
		Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan	1
2	Fungsional Khusus	Jabatan Fungsional Auditor	11
		Jabatan Fungsional P2UPD	3
3	Fungsional Umum	Pelaksana	11
JUMLAH TOTAL			32

2.2.2. Sumber Daya berupa Aset

Sumber Daya berupa asset pada Inspektorat kota Cimahi keadaan bulan Desember 2017 berupa peralatan dan mesin sebanyak 330 unit dengan nilai total Rp2.256.638.345,00.

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Cimahi

Hasil kinerja dalam Renstra Inspektorat Kota Cimahi periode RPJMD 2012-2017 sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, ditunjukkan dalam tabel 2.5. Namun pada bulan Oktober tahun 2017 Renstra Inspektorat Kota Cimahi mengalami perubahan seiring dengan perubahan RPJMD yang diselaraskan dengan visi dan misi Wali Kota terpilih.

Target dan hasil kinerja Renstra tahun 2017 perubahan dibandingkan dengan tahun 2016 dijelaskan pada tabel 2.7, Perubahan yang signifikan terdapat pada unsur-unsur perubahan perencanaan yaitu :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU),
2. Perjanjian Kinerja (PK) dari eselon II, eselon III, dan eselon IV,
3. Tujuan
4. Sasaran
5. Indikator sasaran dan tujuan
6. Indikator kinerja program
7. Indikator kinerja kegiatan
8. Target kinerja program dan kegiatan

Sedangkan untuk mengetahui progres pertahun anggaran dan realisasi pendanaan program dan kegiatan Inspektorat tahun 2012-2017 dijelaskan pada tabel 2.8.



TABEL 2.5
PENCAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT
KOTA CIMAHI PERIODE 2012 – 2017

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra per Tahun					Realisasi Renstra per Tahun					Rasio Capaian Tahun ke-					Rerata rasio capaian selama 5 tahun Renstra
				Tahun ke -1 Th.2013	Tahun ke -2 Th.2014	Tahun ke -3 Th.2015	Tahun ke -4 Th.2016	Tahun ke -5 Th.2017	Tahun ke -1 Th.2013	Tahun ke -2 Th.2014	Tahun ke -3 Th.2015	Tahun ke -4 Th.2016	Tahun ke -5 Th.2017	Tahun ke -1 Th.2013	Tahun ke -2 Th.2014	Tahun ke -3 Th.2015	Tahun ke -4 Th.2016	Tahun ke -5 Th.2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Persentase hasil pengawasan APIP yang dilakukan pemantauan tindak lanjut																		
	Kuantitas pengawasan melalui pemeriksaan terhadap pelaksanaan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota Cimahi																		
	Pemeriksaan reguler	200		40	40	40	40	40	40	40	40	40	35	100%	100%	100%	100%	88%	98%
	Kuantitas pengawasan melalui pemeriksaan tertentu berdasarkan kebijakan pimpinan organisasi pemerintah daerah																		



Inspektorat Kota Cimahi

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra per Tahun					Realisasi Renstra per Tahun					Rasio Capaian Tahun ke-					Rerata rasio capaian selama 5 tahun Renstra
				Tahun ke -1 Th.2013	Tahun ke -2 Th.2014	Tahun ke -3 Th.2015	Tahun ke -4 Th.2016	Tahun ke -5 Th.2017	Tahun ke -1 Th.2013	Tahun ke -2 Th.2014	Tahun ke -3 Th.2015	Tahun ke -4 Th.2016	Tahun ke -5 Th.2017	Tahun ke -1 Th.2013	Tahun ke -2 Th.2014	Tahun ke -3 Th.2015	Tahun ke -4 Th.2016	Tahun ke -5 Th.2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Pemeriksaan tertentu	40		8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Kuantitas monitoring terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah																		
	Monitoring dan Evaluasi	570		100	107	114	121	128	125	60	43	50	75	125%	56%	38%	41%	59%	64%
	Monitoring Banprov	50		10	10	10	10	10	0	0	40	15	0	0%	0%	400%	150%	0%	110%
	Kuantitas penilaian terbatas terhadap Laporan Keuangan Daerah kesesuaian dgn sistem akuntansi pemerintah																		
	Reviu LKPD	5		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kuantitas penilaian terbatas terhadap perencanaan kegiatan dan anggaran perangkat daerah Pemerintah Kota Cimahi																		
	Reviu RKA	3		0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0%	0%	100%	100%	0%	40%



Inspektorat Kota Cimahi

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra per Tahun					Realisasi Renstra per Tahun					Rasio Capaian Tahun ke-					Rerata rasio capaian selama 5 tahun Renstra
				Tahun ke -1 Th.2013	Tahun ke -2 Th.2014	Tahun ke -3 Th.2015	Tahun ke -4 Th.2016	Tahun ke -5 Th.2017	Tahun ke -1 Th.2013	Tahun ke -2 Th.2014	Tahun ke -3 Th.2015	Tahun ke -4 Th.2016	Tahun ke -5 Th.2017	Tahun ke -1 Th.2013	Tahun ke -2 Th.2014	Tahun ke -3 Th.2015	Tahun ke -4 Th.2016	Tahun ke -5 Th.2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Kuantitas penilaian terhadap akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah di lingkungan (LAKIP) Pemerintah Kota Cimahi																		
	Evaluasi LAKIP	200		40	40	40	40	40	40	40	40	41	40	100%	100%	100%	103%	100%	101%
	Reviu LAKIP																		
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (diperiksa)																		
	Pemeriksaan Kasus /Khusus	70		20	20	20	5	5	30	7	4	3	2	150%	35%	20%	60%	40%	61%
	Persentase hasil pengawasan APIP yang dilakukan pemantauan tindak lanjut																		
	Tindak Lanjut LHP	421		100	107	114	50	50	125	100	107	48	50	125%	93%	94%	96%	100%	102%
2	Jumlah Pranata Pengawasan																		
	PKPT	5		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Arah Kebijakan/ Jakwas	5		1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0%	0%	100%	0%	0%	20%
	Kode Etik	1		1					0	0	1	0	0	0%	0%	100%	0%	0%	20%



Inspektorat Kota Cimahi

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra per Tahun					Realisasi Renstra per Tahun					Rasio Capaian Tahun ke-					Rerata rasio capaian selama 5 tahun Renstra
				Tahun ke -1 Th.2013	Tahun ke -2 Th.2014	Tahun ke -3 Th.2015	Tahun ke -4 Th.2016	Tahun ke -5 Th.2017	Tahun ke -1 Th.2013	Tahun ke -2 Th.2014	Tahun ke -3 Th.2015	Tahun ke -4 Th.2016	Tahun ke -5 Th.2017	Tahun ke -1 Th.2013	Tahun ke -2 Th.2014	Tahun ke -3 Th.2015	Tahun ke -4 Th.2016	Tahun ke -5 Th.2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Standar Audit	1		1					1	1	1	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	33%
	POP	1		1					1	1	0	1	0	100%	0%	0%	0%	0%	33%
	Internal Audit Charter	1		1							1	0	1	0%	0%	100%	0%	0%	50%
	Pemetaan Profil SPIP Kota Cimahi	0									0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Tes Diagnostik SPIP Kota Cimahi	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Pelaksanaan evaluasi atas hasil pengawasan dan kesesuaian dengan arah kebijakan, program kerja dan perencanaan																		
	Gelar Pengawasan	10		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Aparatur pengawasan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan peningkatan wawasan lainnya																		
	PKS	155 org		31	31	31	31	31	31	31	38	30	68	100%	100%	123%	97%	219%	128%
	Diklat substantif pengawasan	20 org		5	5	5	5	5	0	35	25	3	3	0%	700%	500%	60%	60%	264%
	Diklat JFA	90 org		18	18	18	18	18	0	0	0	0	2	0%	0%	0%	0%	11%	2%
	Sosialisasi UU Pengawasan	60 org		12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%



Inspektorat Kota Cimahi

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra per Tahun					Realisasi Renstra per Tahun					Rasio Capaian Tahun ke-					Rerata rasio capaian selama 5 tahun Renstra
				Tahun ke -1 Th.2013	Tahun ke -2 Th.2014	Tahun ke -3 Th.2015	Tahun ke -4 Th.2016	Tahun ke -5 Th.2017	Tahun ke -1 Th.2013	Tahun ke -2 Th.2014	Tahun ke -3 Th.2015	Tahun ke -4 Th.2016	Tahun ke -5 Th.2017	Tahun ke -1 Th.2013	Tahun ke -2 Th.2014	Tahun ke -3 Th.2015	Tahun ke -4 Th.2016	Tahun ke -5 Th.2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4	Persentase fasilitasi operasional dan administrasi perkantoran sesuai dengan kebutuhan																		
	Pendistribusian Surat Keluar dan Surat Masuk	5 tahun		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Telepon, air dan Listrik	5 tahun		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Asuransi kendaraan bermotor	90 unit		18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	17 unit	100%	100%	100%	100%	94%	99%
	Jasa Service penggantian suku cadang dan belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (revisi renstra)	90 unit		18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	17 unit	100%	100%	100%	100%	94%	99%
	Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor	5 tahun		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5 tahun		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Alat tulis Kantor	5 tahun		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Barang Cetakan dan Penggandaan	5 tahun		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Inspektoraat Kota Cimahi

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra per Tahun					Realisasi Renstra per Tahun					Rasio Capaian Tahun ke-					Rerata rasio capaian selama 5 tahun Renstra
				Tahun ke -1 Th.2013	Tahun ke -2 Th.2014	Tahun ke -3 Th.2015	Tahun ke -4 Th.2016	Tahun ke -5 Th.2017	Tahun ke -1 Th.2013	Tahun ke -2 Th.2014	Tahun ke -3 Th.2015	Tahun ke -4 Th.2016	Tahun ke -5 Th.2017	Tahun ke -1 Th.2013	Tahun ke -2 Th.2014	Tahun ke -3 Th.2015	Tahun ke -4 Th.2016	Tahun ke -5 Th.2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang-undangan	5 tahun		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Bahan Pokok/Natura	5 tahun		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Makanan dan minuman rapat dan tamu	5 tahun		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Biaya Perjalanan Dinas dalam dan Luar daerah	5 tahun		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase pemenuhan kebutuhan peningkatan peralatan kerja dan sarana prasarana kerja																		



Inspektoraat Kota Cimahi

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra per Tahun					Realisasi Renstra per Tahun					Rasio Capaian Tahun ke-					Rerata rasio capaian selama 5 tahun Renstra
				Tahun ke -1 Th.2013	Tahun ke -2 Th.2014	Tahun ke -3 Th.2015	Tahun ke -4 Th.2016	Tahun ke -5 Th.2017	Tahun ke -1 Th.2013	Tahun ke -2 Th.2014	Tahun ke -3 Th.2015	Tahun ke -4 Th.2016	Tahun ke -5 Th.2017	Tahun ke -1 Th.2013	Tahun ke -2 Th.2014	Tahun ke -3 Th.2015	Tahun ke -4 Th.2016	Tahun ke -5 Th.2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	belanja Modal peralatan dan perlengkapan kantor	4 Lemari Arsip, 7 PC, 9 Printer, 1 Scanner, 3 Monitor, partisi, 1 infocus, 2 unit mobil, 1 unit tv, 2 ac, 8 Unit motor. 4 penghancur kertas. 3 notebook. atau 1 paket		2 lemari arsip, 3 PC, 1 scanner, 3 monitor, partisi . atau 1 paket	1 infocus, 1 mobil . atau 1 paket	2 lemari arsip, 4 PC, 4 printer, 1 TV, 2 AC, 3 unit sepeda motor . atau 1 paket	4 penghancur kertas, 2 printer A3, 2 unit sepeda motor, 3 unit notebook. atau 1 paket	1 unit mobil, 3 unit sepeda motor . atau 1 paket	2 lemari besi, 3 unit filling besi/metal, 1 unit AC, 1 unit meubeuler lainnya/partisi, 4 unit PC, 3 unit monitor, 4 unit printer, 1 unit scanner. atau 1 paket	1 unit lemari besi, 1 unit meubeuler lainnya, 4 unit PC, 2 unit note book, 6 unit printer, 1 unit slide projector, 1 unit layar. atau 1 paket	3 unit filling besi/metal, 2 unit lemari kayu, 1 paket meubeuler, 2 unit AC, 1 unit TV, 1 paket camera, 3 unit PC, 2 unit laptop, 1 unit printer, 1 unit scanner, 1 unit monitor, 7 unit printer, 1 unit external, 2 unit camera elektronik, . atau 1 paket	10 unit kursi kerja putar, 3 unit printer, dan 3 unit PC. atau 1 paket	10 filling cabinet, 1 brankas, 3 penghancur kertas, 5 kursi kerja putar, 1 projektor, 1 lemari arsip, 1 scanner, 1 paket meubeulair lainnya, 10 unit PC, 3 unit printer, 1 paket presiden dan burung garuda. atau 1 paket	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan peralatan dan sarana prasarana kerja yang masih layak secara ekonomis																		



Inspektorat Kota Cimahi

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra per Tahun					Realisasi Renstra per Tahun					Rasio Capaian Tahun ke-					Rerata rasio capaian selama 5 tahun Renstra
				Tahun ke -1 Th.2013	Tahun ke -2 Th.2014	Tahun ke -3 Th.2015	Tahun ke -4 Th.2016	Tahun ke -5 Th.2017	Tahun ke -1 Th.2013	Tahun ke -2 Th.2014	Tahun ke -3 Th.2015	Tahun ke -4 Th.2016	Tahun ke -5 Th.2017	Tahun ke -1 Th.2013	Tahun ke -2 Th.2014	Tahun ke -3 Th.2015	Tahun ke -4 Th.2016	Tahun ke -5 Th.2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	BBM dan Pelumas kendaraan	90 unit		18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	17 unit	100%	100%	100%	100%	94%	99%
7	Persentase pegawai yang memperoleh pembinaan dalam upaya peningkatan disiplin aparatur																		
	Sosialisasi Perundang-undangan untuk 60 orang	300 org		60	60	60	60	60	50	81	125	60	49	83%	135%	208%	100%	82%	122%
	Pembinaan Pegawai	155 org		31	31	31	31	31	31	31	32	31	32	100%	100%	103%	100%	103%	101%
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal																		
	Disiplin Pegawai																		
	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	250 stel		50	50	50	50	50	30	0	0	0	40	60%	0%	0%	0%	80%	28%
	pengadaan pakaian KORPRI	155 buah		31	31	31	31	31	30	0	0	0	0	97%	0%	0%	0%	0%	19%
	Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu	155 buah		31	31	31	31	31	30	0	0	0	35	97%	0%	0%	0%	113%	42%
8	Terpenuhinya semua laporan dan dokumen kerja yang diwajibkan																		



Inspektorat Kota Cimahi

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra per Tahun					Realisasi Renstra per Tahun					Rasio Capaian Tahun ke-					Rerata rasio capaian selama 5 tahun Renstra
				Tahun ke -1 Th.2013	Tahun ke -2 Th.2014	Tahun ke -3 Th.2015	Tahun ke -4 Th.2016	Tahun ke -5 Th.2017	Tahun ke -1 Th.2013	Tahun ke -2 Th.2014	Tahun ke -3 Th.2015	Tahun ke -4 Th.2016	Tahun ke -5 Th.2017	Tahun ke -1 Th.2013	Tahun ke -2 Th.2014	Tahun ke -3 Th.2015	Tahun ke -4 Th.2016	Tahun ke -5 Th.2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Laporan Triwulan ,LAKIP, LKPJ, LKPD	35 laporan		7	7	7	7	7	7	7	7	7	9	100%	100%	100%	100%	129%	106%
	Menyusun Laporan Semesteran	10 laporan		2	2	2	2	2	4	4	2	4	4	200%	200%	100%	200%	200%	180%

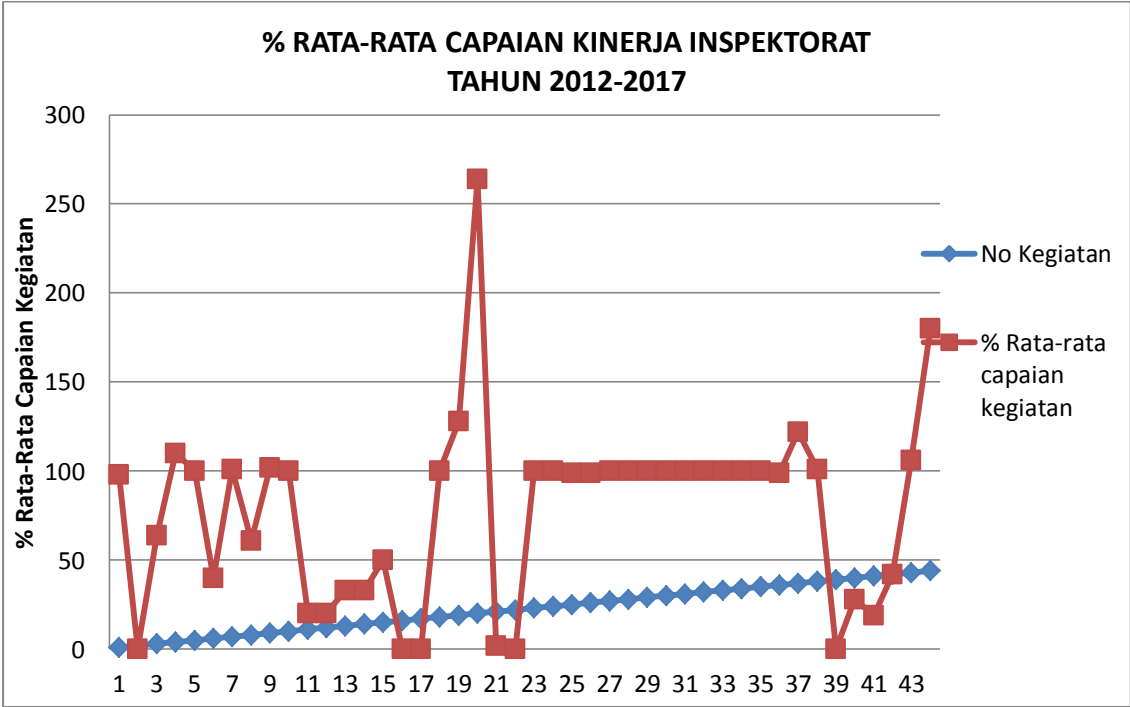


Berdasarkan data dalam tabel 2.5, Rata-rata rasio capaian kinerja dari 8 program, 29 kegiatan, dan 44 sub kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Kota Cimahi selama 5 tahun Renstra dijelaskan dalam tabel 2.6 dan gambar grafik 2.2.

Tabel 2.6
Rata-Rata Rasio Capaian Kinerja Inspektorat
Tahun 2012-2017

No	Indikator Kinerja (output)	Target Renstra selama 5 thn	Realisasi Renstra selama 5 thn	% Rata-rata rasio capaian kinerja
1	Pemeriksaan regular	200 LHP	195 LHP	98%
2	Pemeriksaan tertentu	40 LHP	0 LHP	0%
3	Monitoring dan Evaluasi	570 LHM	353 LHM	64%
4	Monitoring Banprov	50 LHM	55 LHM	110%
5	Reviu LKPD	5 LHR	5 LHR	100%
6	Reviu RKA	3 LHR	2 LHR	40%
7	Evaluasi LAKIP	200 LHE	201 LHE	101%
8	Pemeriksaan Kasus /Khusus	70 LHP Kasus	46 LHP Kasus	61%
9	Tindak Lanjut LHP	421 BA	430 BA	102%
10	PKPT	5 dok	5 dok	100%
11	Arah Kebijakan/Jakwas	5 dok	1 dok	20%
12	Kode Etik	5 dok	1 dok	20%
13	Standar Audit	1 dok	3 dok	33%
14	POP	1 dok	3 dok	33%
15	Internal Audit Charter	1 dok	2 dok	50%
16	Pemetaan Profil SPIP Kota Cimahi	0	0	0%
17	Tes Diagnostik SPIP Kota Cimahi	0	0	0%
18	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan/ Gelar Pengawasan	10 kali	10 kali	100%
19	PKS	155 orang	198 orang	128%
20	Diklat substantif pengawasan	25 orang	66 orang	264%
21	Diklat JFA	90 orang	2 orang	2%
22	Sosialisasi UU Pengawasan	60 orang	0	0%
23	Pendistribusian Surat Keluar dan Surat Masuk	60 bulan	60 bulan	100%
24	Telepon, air dan Listrik	60 bulan	60 bulan	100%
25	Asuransi kendaraan bermotor	90 unit	89 unit	99%
26	Jasa Service penggantian suku cadang dan belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (revisi renstra)	90 unit	89 unit	99%
27	Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor	60 bulan	60 bulan	100%

No	Indikator Kinerja (output)	Target Renstra selama 5 thn	Realisasi Renstra selama 5 thn	% Rata-rata rasio capaian kinerja
28	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	60 bulan	60 bulan	100%
29	Alat tulis Kantor	60 bulan	60 bulan	100%
30	Barang Cetakan dan Penggandaan	60 bulan	60 bulan	100%
31	Surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang-undangan	60 bulan	60 bulan	100%
32	Bahan Pokok/Natura	60 bulan	60 bulan	100%
33	Makanan dan minuman rapat dan tamu	60 bulan	60 bulan	100%
34	Biaya Perjalanan Dinas dalam dan Luar daerah	60 bulan	60 bulan	100%
35	Belanja Modal peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	1 paket	100%
36	BBM dan Pelumas kendaraan	90 unit	89 unit	99%
37	Sosialisasi Perundang-undangan untuk 60 orang	300 orang	365 orang	122%
38	Pembinaan Pegawai	155 orang	157 orang	101,%
39	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	0	0	0%
40	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	250 stel	70 stel	28%
41	pengadaan pakaian KORPRI	155 stel	30 stel	19%
42	Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu	155 stel	65 stel	42%
43	Laporan Triwulan ,LAKIP, LKPI, LKPD	35 laporan	37 laporan	106%
44	Menyusun Laporan Semesteran	10 laporan	18 laporan	180%



Gambar Grafik 2.2. Persentase Rata-Rata Rasio Capaian Kinerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2012-2017



Pencapaian kinerja program dan kegiatan Inspektorat Kota Cimahi periode 2012 – 2017 dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran: Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas tata kelola pemerintahan di Kota Cimahi;

a. Indikator kinerja : Kuantitas pengawasan melalui pemeriksaan terhadap pelaksanaan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota Cimahi;

1) Program : Peningkatan sistem pengawasan internal dan pelaksanaan pengendalian kebijakan Kepala Daerah;

a) Kegiatan : Pengawasan internal secara berkala, dijelaskan bahwa sub kegiatan **pemeriksaan reguler** tidak mencapai target pada tahun kelima dengan rasio 88% atau 35 obyek pemeriksaan (obrik). Target awal Renstra sebanyak 40 obrik menjadi 35 obrik. Penurunan jumlah objek pemeriksaan dikarenakan :

- Jumlah obyek pemeriksaan menjadi 28 Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, bahwa terdapat perubahan susunan Perangkat Daerah, yaitu :
 - Sekretariat Daerah, yang terbagi menjadi 8 bagian,
 - Sekretariat Dewan,
 - Inspektorat,
 - 15 Dinas
 - 4 Badan
 - 3 Kecamatan, yang terdiri dari 15 Kelurahan

b. Indikator Kinerja : Kuantitas pengawasan melalui pemeriksaan tertentu berdasarkan kebijakan pimpinan organisasi pemerintah daerah;

1) Program : Peningkatan sistem pengawasan internal dan pelaksanaan pengendalian kebijakan Kepala Daerah;

a) Kegiatan : Pengawasan internal secara berkala, dijelaskan bahwa **pemeriksaan tertentu** tidak mencapai target selama lima tahun dengan rasio 0% atau realisasi 0, tidak dilaksanakan karena bersifat tentatif dari pemeriksaan reguler yang harus ditindaklanjuti.

c. Indikator Kinerja : Kuantitas monitoring terhadap pelaksanaan urusan pemeritahan daerah;

1) Program : Peningkatan sistem pengawasan internal dan pelaksanaan pengendalian kebijakan Kepala Daerah;

a) Kegiatan : Pengawasan internal secara berkala, dijelaskan bahwa kegiatan **Monitoring dan evaluasi** yang setiap tahun mengalami rasio naik dan turun. Namun selama 5 tahun Renstra secara keseluruhan mencapai rata-rata persentase kinerja 64% dengan output 353 LHM (Laporan Hasil Monitoring), diantaranya Monitoring Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Monitoring Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB), Monitoring Pendapatan Daerah, Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK), Monitoring Tunjangan Profesi Guru (TPG), Monitoring Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Capaian kinerja tidak mencapai 100%, karena terkendala waktu pemeriksaan dan jumlah Auditor yang terbatas.

b) Kegiatan : Bantuan Operasional Pemeriksaan Bantuan Hibah, Bansos, dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa barat, dijelaskan bahwa kegiatan **Monitoring Bantuan Provinsi** pada Tahun ke-1, Tahun ke-2, dan Tahun ke-5 tidak dilaksanakan dengan rasio 0%. Pelaksanaan dilakukan pada Tahun ke-3 dan ke-4, dengan rasio melebihi target renstra, yaitu 400% pada Tahun ke-3 dan 150% pada Tahun ke-4. Rasio rata-rata mencapai 110%.

Tidak terlaksananya Monitoring Bantuan Provinsi di tahun ke-1, ke-2, dan ke-5 disebabkan oleh faktor prosedural dan administratif yang belum memadai sehingga dana Banprov terhambat.

d. Indikator Kinerja : Kuantitas penilaian terbatas terhadap Laporan Keuangan Daerah kesesuaian dengan sistem akuntansi pemerintah;

1) Program : Peningkatan sistem pengawasan internal dan pelaksanaan pengendalian kebijakan Kepala Daerah;

a) Kegiatan : Pengawasan internal secara berkala, dijelaskan bahwa **kegiatan Reviu LKPD** yang telah mencapai target renstra 100% dengan output 5 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, hasil akumulasi reviu dari seluruh Perangkat Daerah.

e. Indikator Kinerja : Kuantitas penilaian terbatas terhadap perencanaan kegiatan dan anggaran PD Pemerintah Kota Cimahi;

1) Program : Peningkatan sistem pengawasan internal dan pelaksanaan pengendalian kebijakan Kepala Daerah;

- a) Kegiatan : Pengawasan internal secara berkala, dijelaskan bahwa **kegiatan Reviu RKA** telah mencapai target Renstra 100% pada tahun ke-3, dan ke-4. Sedangkan tahun ke-1, ke-2, dan ke-5 capaian target 0%, tidak dilaksanakan. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi dalam penyusunan jadwal reviu dengan pihak-pihak terkait penyusunan RKA Perangkat Daerah. Kondisi tersebut dijadikan sebagai bahan evaluasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan tahun yang akan datang. Sehingga rasio rata-rata dibawah target yaitu 40%.

f. Indikator Kinerja : Kuantitas penilaian terhadap akuntabilitas dan kinerja PD di lingkungan (LAKIP) Pemerintah Kota Cimahi;

- 1) Program : Peningkatan sistem pengawasan internal dan pelaksanaan pengendalian kebijakan Kepala Daerah;

- a) Kegiatan : Pengawasan internal secara berkala, dijelaskan bahwa **kegiatan Evaluasi LAKIP** telah mencapai target Renstra 100%, dengan rata-rata rasio capaian kinerja sebesar 101%, karena pada tahun ke-4 mencapai 103% dengan jumlah PD yang di evaluasi sebanyak 41 PD. Target Renstra untuk evaluasi LAKIP ini hanya menunjukkan jumlah PD yang dievaluasi, jika diukur berdasarkan rata-rata nilai LAKIP PD, masih belum mencapai nilai yang diharapkan, karena masih terdapat PD yang menentukan Perencanaan (Renstra dan Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan belum berkesinambungan, berorientasi hasil (outcome), dan memenuhi standar kriteria penilaian yang ditentukan. Padahal perencanaan yang baik dari setiap PD dijadikan sebagai tolak ukur kinerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam SAKIP, sebagai bahan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2015 bahwa nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kota Cimahi adalah 48,18 dengan predikat C, tahun 2016 mencapai nilai 50,27 dengan predikat CC, dan tahun 2017 mencapai nilai 60,68 dengan predikat B.

g. Indikator Kinerja : Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (diperiksa),

- 1) Program : Peningkatan sistem pengawasan internal dan pelaksanaan pengendalian kebijakan Kepala Daerah;
 - a) Kegiatan : Penanganan kasus/khusus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa **kegiatan Pemeriksaan Kasus/Khusus** yang mengalami rasio naik dan turun dengan rata-rata rasio 61% atau 51 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP Kasus). Realisasi target tertinggi pada tahun ke-1 sebesar 150% atau 30 LHP dari target 20 LHP dan terendah pada tahun ke-5 sebesar 40% atau 2 LHP dari target 5 LHP. Walaupun pada tahun ke-4 dilakukan perubahan output dalam Renstra Perubahan, dengan awal target 20 kasus menjadi 5 kasus, namun capaian target terendah tetap pada tahun ke-5. Hal ini dipengaruhi oleh kegiatan pemeriksaan yang bersifat tentatif, sehingga tidak dapat diprediksi.

h. Indikator Kinerja : Persentase hasil pengawasan APIP yang dilakukan pemantauan tindak lanjut;

- 1) Program : Peningkatan sistem pengawasan internal dan pelaksanaan pengendalian kebijakan Kepala Daerah;
 - a) Kegiatan : Kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan, dijelaskan bahwa kegiatan **Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)** mencapai target rata-rata rasio sebesar 102%. Namun terdapat perbedaan target setiap tahunnya, sehingga realisasi sulit dibandingkan setiap tahun. Hal ini dikarenakan pada Tahun ke-1, ke-2, ke-3 jumlah Berita Acara (BA) hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti adalah dari pemeriksaan Inspektorat Kota (reguler), hasil pemeriksaan BPK RI, dan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi.

Sedangkan Tahun ke-4 dan ke-5 jumlah hasil pemeriksaan yang ditindaklanjutinya dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kota (reguler) saja. Terjadi perubahan target pada renstratahun 2016 dengan jumlah Berita Acara (BA) tindak lanjut lebih rendah, karena ditentukan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Secara keseluruhan terdapat penurunan jumlah Berita Acara, artinya Perangkat Daerah responsif dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

2. Sasaran : Meningkatkan koordinasi dan sinergitas serta kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan.

a. Indikator Kinerja : Jumlah Pranata Pengawasan yang terdiri dari :

- 1) Sebagai pedoman kinerja Inspektorat, maka setiap tahun disusun PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan), dan mencapai target renstra dengan rata-rata rasio 100%. Namun PKPT yang disusun belum berbasis manajemen risiko, dikarenakan belum memahami risiko-risiko PD secara menyeluruh, dan belum didukung dengan *Risk Register* Maturitas SPIP dari setiap Perangkat Daerah.
- 2) Arah Kebijakan/Jakwas, mencapai target renstra pada tahun ke-3, disusun hanya satu kali dan belum mengalami perubahan hingga tahun ke-5 karena masih relevan dengan kondisi saat tahun berjalan. Walaupun dalam penyusunannya tidak dilaksanakan pada tahun awal Renstra. Hal ini dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan Renstra berikutnya.
- 3) Kode Etik, mencapai target renstra pada tahun ke-3, dan kondisi keberadaannya sama dengan penyusunan arah kebijakan.
- 4) Standar Audit, mencapai target renstra pada tahun ke-1, dan belum mengalami revisi hingga tahun ke-5, karena masih relevan untuk digunakan.
- 5) POP, mencapai target renstra pada tahun ke-1, belum mengalami revisi karena masih relevan.
- 6) IAC (Internal Audit Charter), mencapai target tahun ke-1, belum mengalami revisi karena masih relevan.
- 7) Pemetaan profil SPIP, selama 5 tahun renstra kegiatan ini tidak dilaksanakan, karena tergantung pada risk register dan pengendalian SPIP yang dibuat oleh Perangkat Daerah dan belum dilaksanakannya maturitas SPIP dari setiap Perangkat Daerah.
- 8) Tes diagnostik SPIP, selama 5 tahun renstra kegiatan ini tidak dilaksanakan. karena berkaitan dengan maturitas SPIP.
Maturitas SPIP akan dilaksanakan penuh pada Renstra 2017-2022 yang akan datang, dan kondisi renstra periode sebelumnya menjadai bahan evaluasi Inspekturat dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan.

b. Indikator Kinerja : Pelaksanaan evaluasi atas hasil pengawasan dan kesesuaian dengan arah kebijakan, program kerja dan perencanaan,

- 1) Program : Peningkatan sistem pengawasan internal dan pelaksanaan pengendalian kebijakan Kepala Daerah;

- a) Kegiatan :kegiatan Gelar Pengawasan telah mencapai target renstra dengan rata-rata rasio 100% yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun yaitu semester 1 dan semester 2.
3. Sasaran : Meningkatkan integritas, profesionalisme dan kompetensi aparatur pengawasan bagi peningkatan kualitas hasil pengawasan.
 - a. **Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan peningkatan wawasan lainnya;**
 - 1) Program : Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
 - a) Kegiatan : Kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, dijelaskan bahwa sub kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) mencapai rata-rata rasio sebesar 128%, namun pada tahun ke-4 target tidak tercapai yaitu sebesar 97%. Terdapat 1 pegawai yang tidak mengikuti kegiatan dikarenakan sakit.Tahun ke-3 dan ke-5 realisasi melebihi target renstra masing-masing sebesar 38 orang dan 68 orang atau rasio 123% dan 219%. Ketercapaian melebihi target karena disesuaikan dengan prioritas dan terdesaknya kebutuhan peningkatan pengetahuan di bidang pengawasan.
 - b) Diklat substantif pengawasan, tahun ke-1 tidak dilaksanakan, tahun ke-4 dan ke-5 tidak mencapai target, sedangkan tahun ke-2 sampai dengan ke-3 telah melebihi target, dengan rata-rata rasio sebesar 264%.Tercapai atau tidaknya target,disesuaikan dengan kebutuhan dan jadwal kegiatan dari BPKP Pusat dan Provinsi Jawa Barat (untuk Jabatan Fungsional Auditor), dan Pusbin Kemendagri (untuk Jabatan Fungsional P2UPD).
 - c) Diklat JFA (Jabatan Fungsional Auditor), dilaksanakan pada tahun ke-5 sebanyak 2 orang dengan 1 orang melalui inpassing dan 1 orang melalui diklat pembentukan dengan rata-rata rasio sebesar 2%.Sub kegiatan ini tidak memenuhi target karena disesuaikan dengan ketercukupan anggaran dalam rekrutmen pegawai.
 - d) Sosialisasi UU Pengawasan, tidak dilaksanakan karena telah dipenuhi melalui diklat dan PKS. Rata-rata rasio capaian target adalah 0%.
 4. Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan operasional dan administrasi perkantoran.

a. Persentase fasilitasi operasional dan administrasi perkantoran sesuai dengan kebutuhan;

- 1) Program : Pelayanan administrasi perkantoran, yang terdiri dari 12 kegiatan Ex-Bau. Telah mencapai target Renstra 10 kegiatan. Sedangkan 2 kegiatan tidak mencapai target Renstra yaitu kegiatan asuransi kendaraan bermotor dan jasa service penggantian suku cadang dan belanja STNK mencapai rasio 94% pada tahun ke-5, karena terdapat 1 unit kendaraan bermotor roda 2 dalam kondisi rusak berat dan dalam proses penghapusan.
5. Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan sarana prasarana kerja yang representatif.

a. Persentase pemenuhan kebutuhan peningkatan peralatan kerja dan sarana prasarana kerja;

- 1) Program: Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
 - a) Kegiatan : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan dijelaskan dalam sub kegiatan belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor yang telah melebihi target renstra, rata-rata rasio 100%. Namun terdapat barang modal dalam perencanaan awal renstra yang tidak sesuai dengan realisasi. Artinya perencanaan awal masih belum baik, sehingga akan dijadikan bahan evaluasi agar renstra periode berikutnya dapat disusun terlebih dahulu daftar kebutuhan barang modal.
6. Sasaran : Terpeliharanya peralatan kerja dan sarana prasarana kerja secara efektif, efisien, dan ekonomis.

a. Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan peralatan dan sarana prasarana kerja yang masih layak secara ekonomis;

- a) Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional, dijelaskan dalam sub kegiatan BBM dan pelumas kendaraan. Target renstra pada tahun ke-5 tidak tercapai dengan rasio 94%, karena 1 unit kendaraan bermotor roda 2 dalam keadaan rusak berat dan dalam proses penghapusan.
7. Sasaran : Meningkatnya kinerja aparatur

a. Persentase pegawai yang memperoleh pembinaan dalam upaya peningkatan disiplin aparatur;

- 1) Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a) Kegiatan : Sosialisasi perundang-undangan, dijelaskan bahwa rata-rata rasio telah melebihi target sebesar 122%, dikarenakan

realisasi apeserta yang mengikuti sosialisasi berjumlah 365 orang dari target awal 300 orang. Namun tahun ke-1 dan ke-5 masih dibawah target, karena tidak seluruhnya peserta dapat hadir dalam kegiatan tersebut.

- b) Kegiatan Pembinaan pegawai, telah mencapai target dengan rata-rata rasio 101%. Namun pelaksanaannya belum terencana dan terjadwal berdasarkan kebutuhan.
- c) Pendidikan dan Pelatihan Formal, tidak dilaksanakan karena sifat kegiatannya sama dengan diklat substantif.

2) Program : Disiplin pegawai, dengan kegiatan terdiri dari :

- a) Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya
- b) Pengadaan pakaian KORPRI
- c) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Dilaksanakan pada tahun ke-1 dan ke-5, sedangkan tahun ke-2, ke-3, ke-4 tidak dilaksanakan karena terdapat kebijakan TAPD untuk tidak memenuhi kegiatan tersebut.

8. Sasaran : Tersedianya sistem perencanaan, pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan Inspektorat yang akuntabel.

a. Terpenuhinya semua laporan dan dokumen kerja yang diwajibkan;

1) Program : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;

- a) Kegiatan : Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dijelaskan bahwa kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan :
Laporan triwulan, LAKIP, LKPJ, LPPD dengan rata-rata rasio sebesar 106%. Pada tahun ke-5 target mencapai 129% atau 9 dokumen, dikarenakan terdapat tambahan penyusunan dokumen yaitu Renstra periode 2017-2022 dan profil Inspektorat. Menyusun laporan semesteran berupa prognosis dan laporan semester telah melebihi target rata-rata rasio sebesar 180%, karena realisasi laporan disusun setiap triwulan atau 4 dokumen, sedangkan dalam renstra awal setiap semester atau 2 dokumen.

Selanjutnya akan dijelaskan pada tabel 2.6 tentang target dan hasil capaian kinerja Renstra tahun 2017 perubahan dibandingkan dengan tahun 2016, fokus pada program dan kegiatan core business Inspektorat.



TABEL 2.7
PENCAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT
KOTA CIMAHI PERIODE TAHUN 2017 PERUBAHAN

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra per tahun		Realisasi Renstra per tahun		Rasio Renstra per tahun		Rata-rata rasio capaian selama 2 tahun Renstra
				Tahun ke - 4 (Th. 2016)	Tahun ke - 5 (Th. 2017)	Tahun ke - 4 (Th. 2016)	Tahun ke - 5 (Th. 2017)	Tahun ke - 4 (Th. 2016)	Tahun ke - 5 (Th. 2017)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pelaksanaan pengawasan internal berkala									
1	Persentase OPD dengan hasil evaluasi SAKIP kategori B	100%		100%	100%	70%	130%	70%	130%	100%
1.1	Evaluasi SAKIP OPD	10 opd		10	10	7	13			
2	Persentase Laporan Keuangan OPD yang sesuai SAP	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	10 opd		10	10	10	10			
3	Persentase RKA OPD yang sesuai Pedoman Anggaran	100%		100%	100%	100%	0%	100%	0%	50%
3.1	Reviu RKA/Evaluasi lainnya (Reviu RKPD, Reviu Renja, reviu KUA-PPAS, Reviu RPJMD, Reviu Renstra, Reviu RA dan PBJ)	10 opd		10	0	10	0	100%	0	
4	Persentase penurunan jumlah temuan	100%			100%		38%		38%	38%
4.1	Pemeriksaan Reguler			274	295		Naik 8%			
4.2	Pemeriksaan tertentu			0	0		0%			
4.3	Monitoring dan evaluasi			386	302		Turun 22 %			
4.4	Pencegahan korupsi terintegrasi			0	40		100%			
4.5	Monitoring Banpprov			0	0		0%			



No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra per tahun		Realisasi Renstra per tahun		Rasio Renstra per tahun		Rata-rata rasio capaian selama 2 tahun Renstra
				Tahun ke - 4 (Th. 2016)	Tahun ke - 5 (Th. 2017)	Tahun ke - 4 (Th. 2016)	Tahun ke - 5 (Th. 2017)	Tahun ke - 4 (Th. 2016)	Tahun ke - 5 (Th. 2017)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Persentase OPD pelayanan/perizinan yang bebas pungli	100%			100%		100%		100%	100%
5.1	Sapu bersih pungutan liar	40		0	40	0	40	0	100%	100%
6	Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti	100%			100%		100%		382%	382%
6.1	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (TLHP)	250 temuan			250		954		382%	
6.2	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	250 temuan			250		954		382%	
7	Meningkatkan implementasi SPIP	Level 2			Level 2		Level 1,26		63%	63%
7.1	Tingkat Maturitas SPIP	Level 2			Level 2		Level 1,26		63%	63%
8	Pengawasan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti (diperiksa)	100%			100%		20%		20%	20%
8.1	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemda	10 opd			10		2		20%	20%
9	IACM (Internal Audit Capability Model) atau Level APIP	Level 2			Level 2		Level 2		100%	100%
9.1	Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Level 2			Level 2		Level 2		100%	100%
9.2	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	2 kali diklat			2 kali diklat		2 kali diklat			
9.3	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Level 2			Level 2		Level 2		100%	100%
9.4	Pembinaan pegawai	34 org			34 org		34 org			
9.5	Keterampilan dan profesionalisme	5 org			5 org		5 org			



No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra per tahun		Realisasi Renstra per tahun		Rasio Renstra per tahun		Rata-rata rasio capaian selama 2 tahun Renstra
				Tahun ke - 4 (Th. 2016)	Tahun ke - 5 (Th. 2017)	Tahun ke - 4 (Th. 2016)	Tahun ke - 5 (Th. 2017)	Tahun ke - 4 (Th. 2016)	Tahun ke - 5 (Th. 2017)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Persentase fasilitasi operasional dan administrasi perkantoran sesuai dengan kebutuhan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.2	Kegiatan Jasa Komunikasi,internet, Sumber Daya Air dan Listrik	100%		100%	100%	100%	94%	100%	100%	100%
10.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.4	Kegiatan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	100%		100%	100%	100%	94%	100%	94%	97%
10.5	Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100%		100%	100%	100%	94%	100%	94%	97%
10.6	Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.7	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.8	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.9	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.10	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.11	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.12	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase pemenuhan kebutuhan peningkatan peralatan kerja dan sarana prasarana kerja	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.1	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan peralatan dan sarana prasarana kerja yang masih layak secara ekonomis	100%		100%	100%	100%	98%	100%	98%	99%



No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra per tahun		Realisasi Renstra per tahun		Rasio Renstra per tahun		Rata-rata rasio capaian selama 2 tahun Renstra
				Tahun ke - 4 (Th. 2016)	Tahun ke - 5 (Th. 2017)	Tahun ke - 4 (Th. 2016)	Tahun ke - 5 (Th. 2017)	Tahun ke - 4 (Th. 2016)	Tahun ke - 5 (Th. 2017)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100%		100%	100%	100%	94%	100%	94%	97%
12.2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.3	Kegiatan Pengadaan Pakaian Korpri	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
12.4	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan sesuai dengan standar perencanaan dan pelaporan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.2	Kegiatan Penyusunan Laporan Semesteran	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Tabel 2.6 tentang target dan hasil capaian kinerja Renstra tahun 2017 perubahan dijelaskan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target IKK	Realisasi	Keterangan
1	2	3	4	5
	Pelaksanaan pengawasan internal berkala			
1	Persentase OPD dengan hasil evaluasi SAKIP kategori B	100%	130%	Melebihi capaian target
1.1	Evaluasi SAKIP OPD	10 opd	13	
2	Persentase Laporan Keuangan OPD yang sesuai SAP	100%	100%	Sesuai target
2.1	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	10 opd	10 opd	
3	Persentase RKA OPD yang sesuai Pedoman Anggaran	100%	0%	Tidak dilaksanakan, karena kurangnya koordinasi dalam penyusunan jadwal reviu dengan pihak-pihak terkait penyusunan RKA Perangkat Daerah
3.1	Reviu RKA/Evaluasi lainnya (Reviu RKPD, Reviu Renja, reviu KUA-PPAS, Reviu RPJMD, Reviu Renstra, Reviu RA dan PBJ)	10 opd	0	
4	Persentase penurunan jumlah temuan	100%	38%	Persentase penurunan jumlah temuan akan lambat mencapai target ideal 100%, sepanjang masih terdapat kelemahan-kelemahan kinerja OPD, namun hal ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi kinerja Inspektorat dalam menyusun perencanaan, sistem dan metoda pengawasan berikutnya yang fokus pada aspek 3E (ekonomis, efisien, dan efektif).
4.1	Pemeriksaan Reguler		Naik 8%	
4.2	Pemeriksaan tertentu		0%	
4.3	Monitoring dan evaluasi		Turun 22 %	
4.4	Pencegahan korupsi terintegrasi		100%	
4.5	Monitoring Banprov		0%	Tidak dilaksanakan, karena terdapat faktor prosedural dan administratif yang belum memadai sehingga dana Banprov terhambat.
5	Persentase OPD pelayanan/perizinan yang bebas pungli	100%	100%	Kegiatan masih dalam tahap pembentukan tim saber pungli, koordinasi dengan instansi terkait, dan sosialisasi ke OPD dan tidak terdapat temuan pungutan liar di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.
5.1	Sapu bersih pungutan liar	40	40	



No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target IKK	Realisasi	Keterangan
1	2	3	4	5
6	Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti	100%	382%	
6.1	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (TLHP)	250 temuan	954	Telah melebihi capaian target renstra
6.2	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	250 temuan	954	
7	Meningkatkan implementasi SPIP	Level 2	Level 1,26	
7.1	Tingkat Maturitas SPIP	Level 2	Level 1,26	Belum mencapai target renstra, karena kurangnya dokumen pendukung penilaian SPIP, serta belum diterapkannya maturitas SPIP di setiap OPD
8	Pengawasan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti (diperiksa)	100%	20%	
8.1	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemda	10 opd	2	Belum mencapai target, karena sifat kegiatan tentatif, sehingga tidak dapat diprediksi.
9	IACM (Internal Audit Capability Model) atau Level APIP	Level 2	Level 2	Telah mencapai target, dan untuk kemudian akan ditingkatkan ke level 3. Diperlukan komitmen, kerjasama, dan koordinasi secara berkesinambungan antar APIP
9.1	Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Level 2	Level 2	
9.2	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	2 kali diklat	2 kali diklat	
9.3	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Level 2	Level 2	
9.4	Pembinaan pegawai	34 org	34 org	
9.5	Keterampilan dan profesionalisme	5 org	5 org	
10	Persentase fasilitasi operasional dan administrasi perkantoran sesuai dengan kebutuhan	100% (12 bulan)	100% (12 bulan)	
10.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100% (12 bulan)	100% (12 bulan)	Tercapai
10.2	Kegiatan Jasa Komunikasi,internet, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	94%	Terdapat 1 kendaraan roda 2 yang rusak berat, sehingga tidak digunakan
10.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100% (12 bulan)	100% (12 bulan)	tercapai
10.4	Kegiatan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	100% (18 unit)	94% (17 unit)	Terdapat 1 kendaraan roda 2 yang rusak berat, sehingga tidak digunakan
10.5	Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100% (18 unit)	94% (17 unit)	Terdapat 1 kendaraan roda 2 yang rusak berat, sehingga tidak digunakan
10.6	Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor	100% (12 bulan)	100% (12 bulan)	Tercapai
10.7	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	100% (12 bulan)	100% (12 bulan)	Tercapai
10.8	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100% (12 bulan)	100% (12 bulan)	Tercapai
10.9	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100% (12 bulan)	100% (12 bulan)	Tercapai



No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target IKK	Realisasi	Keterangan
1	2	3	4	5
10.10	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100% (12 bulan)	100% (12 bulan)	Tercapai
10.11	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	100% (12 bulan)	100% (12 bulan)	Tercapai
10.12	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	100% (12 bulan)	100% (12 bulan)	Tercapai
11	Persentase pemenuhan kebutuhan peningkatan peralatan kerja dan sarana prasarana kerja	100%	100%	
11.1	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100% (1 paket)	100% (1 paket)	Tercapai
12	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan peralatan dan sarana prasarana kerja yang masih layak secara ekonomis	100%	98%	
12.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100% (18 unit)	94% (17 unit)	Terdapat 1 kendaraan roda 2 yang rusak berat, sehingga tidak digunakan
12.2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	100% (40 stel)	100% (40 stel)	Tercapai
12.3	Kegiatan Pengadaan Pakaian Korpri	0%	0%	Tidak dilaksanakan, karena mengikuti aturan atas larangan pengadaan pakaian Korpri
12.4	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	100% (35 stel)	100% (35 stel)	Tercapai
13	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan sesuai dengan standar perencanaan dan pelaporan	100%	100%	
13.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	100% atau 9 laporan	100% atau 9 laporan	Tercapai
13.2	Kegiatan Penyusunan Laporan Semesteran	100% atau 4 laporan	100% atau 4 laporan	Tercapai

Terlaksananya program dan kegiatan Inspektorat didukung dengan anggaran yang memadai, sehingga dapat berkinerja sesuai harapan. Selama lima tahun renstra terdapat efisiensi atau penghematan anggaran, karena anggaran yang digunakan diselaraskan dengan kebutuhan kegiatan. Pencapaian target anggaran dijelaskan dalam tabel 2.7.



TABEL 2.8
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN INSPEKTORAT KOTA CIMAH
PERIODE 2012 – 2017

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata- rata Pertumb uhan (%)	
				Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Wajib																		
		Inspektorat																		
1	Meningkat nya akuntabilit as dan kualitas tata kelola pemerintah an di Kota Cimahi	Program peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	Kuantitas pengawasan melalui pemeriksaan terhadap pelaksanaan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota Cimahi																	
1.1		Kegiatan pengawasan Internal secara berkala		1,521,098,200	1,746,509,900	1,874,576,983	1,971,209,832	2,033,719,750	1,103,975,000	881,386,000	1,104,045,550	2,280,609,830	2,957,468,650	72.57	50.47	58.90	115.70	145,42	8	35
1.1.1			Pemeriksaan reguler	584,325,000	750,000,000	750,000,000	750,000,000	750,000,000												
			Kuantitas pengawasan melalui pemeriksaan tertentu berdasarkan kebijakan pimpinan organisasi pemerintah																	



Inspektorat Kota Cimahi

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata- rata Pertumb- uhan (%)	
				Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			daerah																	
1.1.2			Pemeriksaan tertentu	48,000,000	48,000,000	48,000,000	48,000,000	48,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Kuantitas monitoring terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah																	
1.1.3			Monitoring dan Evaluasi	265,000,000	283,550,000	302,100,000	320,650,000	339,200,000											6	
1.1.4		Kegiatan Bantuan Operasional Pemeriksaan Bantuan Hibah, Bansos dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat	Monitoring Banprov																	



Inspektorat Kota Cimahi

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata- rata Pertumb- uhan (%)	
				Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kuantitas penilaian terbatas terhadap Laporan Keuangan Daerah kesesuaian dengan sistem akuntansi pemerintah																	
1.1.5		Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Reviu LKPD	44,500,000	47,615,000	50,000,000	54,000,000	58,000,000											7	
			Kuantitas penilaian terbatas terhadap perencanaan kegiatan dan anggaran OPD Pemerintah Kota Cimahi																	
1.1.6			Reviu RKA			75,000,000	115,000,000	120,000,000											29	



Inspektorat Kota Cimahi

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata- rata Pertumb uhan (%)	
				Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kuantitas penilaian terhadap akuntabilitas dan kinerja PD di lingkungan (LAKIP) Pemerintah Kota Cimahi																	
1.1.7			Evaluasi LAKIP	84,350,000	88,567,000	92,785,000	97,000,000	100,000,000											4.4	
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (diperiksa)																	
1.1.8		Kegiatan penanganan kasus/khusus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah	Pemeriksaan Kasus /Khusus	122,233,200	130,000,000	130,000,000	130,000,000	130,000,000	182,233,200	55,565,500	24,447,000	31,975,000	21,318,850	149.09	42.74	18.81	24.60	16.40	1.6	(32)
			Prosentase hasil pengawasan APIP yang dilakukan pemantauan tindak lanjut																	



Inspektorat Kota Cimahi

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata- rata Pertumb- uhan (%)	
				Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.9		Kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Tindak Lanjut LHP	276,920,000	296,304,000	317,045,000	339,238,000	362,985,000	355,640,000	224,976,000	283,803,000	248,652,500	428,151,175	128.43	75.93	89.52	73.30	117,95	7	12,3
2	Meningkatnya koordinasi dan Sinergitas serta kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pelaksanaan pengendalian kebijakan Kepala Daerah	Jumlah Pranata Pengawasan																	
1.1.10		Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	PKPT	24,100,000	25,787,000	27,592,000	29,523,000	31,590,000											7	
			Arah Kebijakan/ Jakwas																	
			Kode Etik																	
			Standar Audit																	
			POP																	
			Internal Audit Charter																	
			Pemetaan Profil SPIP Kota Cimahi																	



Inspektorat Kota Cimahi

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata- rata Pertumb uhan (%)	
				Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Tes Diagnostik SPIP Kota Cimahi																	
			Pelaksanaan evaluasi atas hasil pengawasan dan kesesuaian dengan arah kebijakan, program kerja dan perencanaan																	
1.1.11		Kegiatan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Gelar Pengawasan	71,670,000	76,686,900	82,054,983	87,798,832	93,944,750	71,670,000	35,150,000	57,436,325	86,492,265	70,861,125	100.00	45.84	70.00	98.51	75.43	7	11.24
3	Meningkatnya Integritas, Profesionalisme dan kompetensi aparatur Pengawasan bagi peningkatan kualitas hasil pengawasan	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Prosentase aparatur pengawasan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dan peningkatan wawasan lainnya																	



No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata- rata Pertumb uhan (%)	
				Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	PKS	54,000,000	57,780,000	61,824,000	66,152,000	70,782,000	47,250,000	570,000,000	62,212,500	351,080,000	375,420,000	87.50	986.50	100.63	530.72	530.39	7	372
			Diklat Substanti Pengawasan	140,000,000	140,000,000	140,000,000	140,000,000	140,000,000	-	24,870,000	144,750,000	375.420.000	0	0.00	17.76	103.39	268.16	0	-	61
			Diklat JFA	126,000,000	126,000,000	126,000,000	126,000,000	126,000,000	-		13,460,000	21,140,000	0					16.78		
			Sosialisasi UU Pengawasan	84,000,000	84,000,000	84,000,000	84,000,000	84,000,000												
4	Terpenuhiya kebutuhan operasional dan administrasi perkantoran	Program pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase fasilitasi operasional dan administrasi perkantoran sesuai dengan kebutuhan																	
4.1		Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Pendistribusi an Surat Keluar dan Surat Masuk	2,100,000	2,520,000	3,024,000	3,628,800	4,354,560	2,100,000	2,450,000	6,325,000	22,575,000	25,455,000	100.00	97.22	209.16	622.11	584.56	20	111
4.2		Kegiatan Jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Telepon, air dan Listrik	20,736,000	24,883,200	29,859,840	35,831,808	42,998,170	8,468,093	13,754,001	17,038,966	18,994,908	22,099,546	40.84	55.27	57.06	53.01	51,40	20	28.53



Inspektorat Kota Cimahi

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata- rata Pertumb uhan (%)	
				Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.3		Kegiatan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Asuransi kendaraan bermotor	11,760,000	14,112,000	16,934,400	20,321,280	24,385,536	15,809,909	14,060,800	13,945,500	12,750,800	12,575,200	134.44	99.64	82.35	627.43	51.57	20	178
4.4		Kegiatan Jasa Pemelihara an dan Perizinan Kendaraan Dinas/Ope rasional	Jasa Service penggantian suku cadang dan belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	48,850,000	58,620,000	70,344,000	84,412,800	101,295,360	39,901,454	36,642,121	72,237,025	71,840,802	55,013,338	68.07	52.09	85.58	70.92	137.87	20	16.25
4.5		Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan																		
4.6		Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor	18,600,000	22,320,000	26,784,000	32,140,800	38,568,960	18,321,600	26,647,500	26,140,000	25,916,666	28,270,000	98.50	119.39	97.60	80.63	73.30	20	12.94
4.7		Kegiatan Jasa Kebersihan kantor	peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5,107,200	6,128,640	7,354,368	8,825,242	10,590,290	5,097,500	5,998,000	8,179,000	18,297,500	12,935,000	99.81	97.87	111.21	207.33	122.14	20	37.11
4.8		Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis Kantor	76,920,000	92,304,000	110,764,800	132,917,760	159,501,312	76,880,000	83,416,000	83,881,000	51,448,750	70,814,000	99.95	90.37	75.73	38.71	44.4	20	2.01



Inspektora Kota Cimahi

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata- rata Pertumb uhan (%)	
				Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.9		Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	67,769,000	81,322,800	97,587,360	117,104,832	140,252,798	63,131,500	80,669,500	102,131,750	43,650,875	92,736,275	93.16	99.20	104.66	37.28	66.12	20	27.4
4.10		Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang-undangan	11,760,000	14,112,000	16,934,400	20,321,280	24,385,536	10,800,000	5,600,000	5,790,000	5,840,000	9,420,000	91.84	39.68	34.19	28.74	38.63	20	4.35
4.11		Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Pokok/Naturala	13,539,000	16,246,800	16,496,160	23,395,392	28,074,470	13,414,750	13,930,500	13,895,500	13,174,000	20,849,500	99.08	85.74	84.23	56.31	74.26	21	14.2
4.12		Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman rapat dan tamu	13,575,000	16,290,000	19,548,000	23,457,600	28,149,120	11,380,000	9,075,000	28,061,000	19,820,000	37,225,000	83.83	55.71	143.55	84.49	132.24	20	62
4.13		Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Biaya Perjalanan Dinas dalam dan Luar daerah	171,907,620	206,289,144	147,546,973	297,056,367	356,467,641	191,826,420	258,115,300	226,770,759	266,730,751	345,828,212	111.59	125.12	153.69	89.79	97.02	28	17.42



Inspektorat Kota Cimahi

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata- rata Pertumb- uhan (%)	
				Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5	Terpenuhi-nya kebutuhan peralatan dan sarana prasarana kerja yang representatif	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan kebutuhan peningkatan peralatan kerja dan sarana prasarana kerja																	
5.1		Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	belanja Modal peralatan dan perlengkapan kantor	95,000,000	180,000,000	189,000,000	198,450,000	208,372,500	108,761,300	295,774,000	213,478,445	142,345,000	204,645,100	114.49	164.32	112.95	71.73	98.21	26.1	38.6
6	Terpeliharanya peralatan sarana dan sarana prasarana kerja secara efektif, efisien, dan ekonomis	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan peralatan dan sarana prasarana kerja yang masih layak secara ekonomis																	
6.1		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas Operasional	BBM dan Pelumas kendaraan	104,500,000	125,400,000	150,480,000	180,576,000	216,691,200	97,125,000	140,474,649	195,804,999	180,361,000	156,814,373	92.94	112.02	130.12	72.37	93.07	20	15.77



Inspektorat Kota Cimahi

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata- rata Pertumb uhan (%)	
				Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	Meningkatnya kinerja aparatur	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase pegawai yang memperoleh pembinaan dalam upaya peningkatan disiplin aparatur																	
7.1		Kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan	Sosialisasi Perundang-undangan untuk 60 orang	100,000,000	120,000,000	144,000,000	172,800,000	207,360,000	90,300,000	203,851,000	158,846,250	120,112,000	152,315,000	90.30	169.88	110.31	69.51	73.45	20	26.5
7.2		Kegiatan Pembinaan Pegawai	Pembinaan Pegawai	78,375,000	94,050,000	112,860,000	-		75,682,000	30,900,000	105,795,000	47,000,000	85,500,000	96.56	32.85	93.74	34.70	52.61	20	52.39
7.3		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal					135,432,000	162,518,400												
		Program Disiplin Pegawai																		
7.4		Kegiatan pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	24,800,000	29,760,000	35,712,000	42,854,400	51,425,280	45,465,000	-	-	-	44,970,000	183.33	0.00	0.00	0.00	87.45	20	
7.5		Kegiatan Pengadaan Pakaian KORPRI	pengadaan pakaian KORPRI	10,000,000	12,000,000	14,400,000	17,280,000	20,736,000	9,875,000	-	-	-	-	98.75	0	0	0	0	20	



Inspektorat Kota Cimahi

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata- rata Pertumb uhan (%)	
				Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.6		Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	30,692,500	36,831,000	44,197,200	53,036,640	63,643,968	30,422,000	-	-	-	16,150,000	99.12	0	0	0	25.38	20	
8	Tersedianya sistem perencanaan, pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan Inspektorat Kota Cimahi yang akuntabel	Program peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terpenuhinya semua laporan dan dokumen kerja yang diwajibkan																	
8.1		Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja	Laporan Triwulan, LAKIP, LKPJ, LKPD	36,000,000	40,000,000	43,000,000	47,000,000	51,000,000	34,800,000	27,120,500	29,370,000	18,128,000	56,473,000	96.67	67.80	68.30	38.57	110.73	9.11	39.9
8.2		Kegiatan Penyusunan laporan semesteran	Menyusun Laporan Semesteran	5,800,000	6,200,000	6,800,000	7,200,000	7,600,000	5,800,000	7,035,000	10,950,000	18,833,500	6,089,650	100.00	113.47	161.03	261.58	80.13	7	20.3



Output capaian kinerja Inspektorat bersinergi dengan anggaran dan realisasi pendanaan sebagaimana dijelaskan dalam tabel 2.7. Terdapat nilai anggaran dan realisasi pendanaan yang naik dan turun selama kurun waktu lima tahun pelaksanaan Renstra.

Untuk mengetahui perbandingan kenaikan atau penurunan antara nilai anggaran dengan realisasi pendanaan kinerja Inspektorat, maka dihitung persentase rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi pendanaan. Pertumbuhan anggaran dan realisasi pendanaan ini digunakan sebagai bahan evaluasi dan data dalam menyusun perencanaan anggaran dan target capaian kinerja Renstra Inspektorat pada periode 2017-2022.

Efisiensi penyerapan anggaran diukur dari persentase rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi. Jika “ *Semakin rendah persentase pertumbuhan realisasi dibanding persentase pertumbuhan anggaran, maka semakin efisien penggunaan anggaran tersebut atau semakin baik. Atau sebaliknya tidak efisien (inefisien) .*”

Persentase rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi pendanaan dijelaskan dalam tabel 2.9.

Tabel 2.9
Persentase Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Inspektorat Tahun 2012-2017

No	Indikator Kinerja (output)	Persentase Pertumbuhan (%)		Keterangan
		Anggaran	Realisasi	
1	Pengawasan internal secara berkala	8	35	Inefisien
	a. Pemeriksaan regular			
	b. Pemeriksaan tertentu			
	c. Monitoring dan Evaluasi			
	d. Monitoring Banprov			
	e. Reviu LKPD			
	f. Reviu RKA			
	g. Evaluasi LAKIP			
2	h. Pemeriksaan Kasus /Khusus	1,6	-32	Efisien
3	i. Tindak Lanjut LHP	7	12,3	Inefisien
4	j. Pranata :	7	0	Efisien
	- PKPT			
	- Arah Kebijakan/Jakwas			
	- Kode Etik			
	- Standar Audit			
	- POP			

No	Indikator Kinerja (output)	Persentase Pertumbuhan (%)		Keterangan
		Anggaran	Realisasi	
	- Internal Audit Charter			
	- Pemetaan Profil SPIP Kota Cimahi			
	- Tes Diagnostik SPIP Kota Cimahi			
5	k. Gelar Pengawasan	7	11,24	Inefisien
6	PKS	7	372	Inefisien
7	Diklat substantif pengawasan	0	61	Inefisien
8	Diklat JFA	0	0	Efisien
9	Sosialisasi UU Pengawasan	0	0	Efisien
10	Pendistribusian Surat Keluar dan Surat Masuk	20	111	Inefisien
11	Telepon, air dan Listrik	20	28,53	Inefisien
12	Asuransi kendaraan bermotor	20	178	Inefisien
13	Jasa Service penggantian suku cadang dan belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (revisi renstra)	20	16,25	Efisien
14	Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor	20	12,94	Efisien
15	peralatan kebersihan dan bahan pembersih	20	37,11	Inefisien
16	Alat tulis Kantor	20	2,01	Efisien
17	Barang Cetakan dan Penggandaan	20	27,4	Inefisien
18	Surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang-undangan	20	4,35	Efisien
19	Bahan Pokok/Natura	21	14,2	Efisien
20	Makanan dan minuman rapat dan tamu	20	62	Inefisien
21	Biaya Perjalanan Dinas dalam dan Luar daerah	28	17,42	Efisien
22	belanja Modal peralatan dan perlengkapan kantor	26,1	38,6	Inefisien
23	BBM dan Pelumas kendaraan	20	15,77	Efisien
24	Sosialisasi Perundang-undangan untuk 60 orang	20	26,5	Inefisien
25	Pembinaan Pegawai	20	52,29	Inefisien
26	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	20	0	Efisien
27	pengadaan pakaian KORPRI	20	0	Efisien
28	Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu	20	0	Efisien
29	Laporan Triwulan ,LAKIP, LKPJ, LKPD	9,11	39,9	Inefisien
30	Menyusun Laporan Semesteran	7	20,3	Inefisien

Tabel 2.8 menunjukkan bahwa inefisiensi anggaran sedikit lebih dominan dibanding efisien anggaran. Hal ini terjadi karena dua kemungkinan yaitu :



1. Dalam menentukan realisasi anggaran renstra setiap tahun yang direncanakan di RKA, DPA, dan Renja, kurang memperhatikan target anggaran sebagaimana yang tercantum dalam renstra. atau
2. Dalam menentukan prediksi anggaran target renstra, kurang memperhatikan tingkat fluktuasi inflasi rupiah setiap tahun. Berdasarkan data BPS dan BI tentang rata-rata inflasi tahunan umum Indonesia selama 10 tahun dari tahun 2007-2016 adalah 5,94 % atau 6 % per tahun, yang ditunjukkan dengan kenaikan harga.

Data pengukuran rasio pertumbuhan anggaran ini dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan anggaran pada periode renstra berikutnya dengan selalu memperhatikan faktor faktor

1. Kesiapan perencanaan program.
2. Ketelitian dan kehati-hatian dalam proses menentukan kebutuhan.
3. Keseimbangan antara penyerapan anggaran dengan output dan outcome program kegiatan.
4. Tingkat urgensi anggaran.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kota Cimahi

Inspektorat Kota Cimahi sebagai unsur penjamin kualitas atas kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, kehati-hatian (*prudence*) dan ekonomis dalam melaksanakan kinerja dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Cimahi. Tantangan yang dihadapi tidak ringan pada kurun waktu lima tahun yang akan datang, namun demikian Inspektorat Kota Cimahi menganggap bahwa tantangan-tantangan di masa depan merupakan sebuah peluang untuk lebih berperan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengawasan yang berwawasan pembinaan, bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Beberapa tantangan yang dihadapi diantaranya adalah :

1. Inspektorat akan secara komprehensif dan berkala melakukan deteksi dini terhadap potensi KKN serta sekaligus menutup celah KKN tersebut. Langkah-langkah kinerja akan dilanjutkan dengan melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomo 356/5152/SJ tanggal 12 Desember



2012 tentang Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah, dan Instruksi Presiden Nomor 16 tahun 2010 tentang Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan 2017, terdiri dari :

- a. 4 (empat) Perangkat Daerah telah membuat rencana aksi daerah yang bersifat *top down* yaitu Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Unit Layanan Pengadaan, dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- b. 18 (delapan belas) Perangkat Daerah telah membuat rencana aksi KPK RI yang bersifat *bottom up*, dengan template rencana aksi telah disediakan oleh Kemendagri.

Implementasi rencana aksi akan terus dimonitoring dan dievaluasi agar terukur progress dari setiap Perangkat Daerah akan kesungguhan memberantas KKN.

2. Membentuk dan menerapkan Tim Maturitas SPIP di tingkat Pemerintah Kota Cimahi dan di setiap unit kerja Perangkat Daerah. Pembinaan Inspektorat terhadap SPIP akan dilanjutkan dengan memperbaiki sistem dan proses penilaiannya.
3. Meningkatkan kualitas kinerja dan sistem pengawasan melalui pemeriksaan berbasis audit kinerja dengan memperhatikan aspek 3E (ekonomis, efisien, dan efektif) pada pengelolaan keuangan, sarana & prasarana, tupoksi, SDM, dan metode kerja.

Tantangan-tantangan pengembangan pelayanan Inspektorat Kota Cimahi yang di masa depan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Peningkatan penyelenggaraan administrasi umum, dengan penyediaan fasilitas kerja pegawai agar terciptasuasana dan iklim kerja yang kondusif.
- b. Adanya peningkatan mutu aparatur pengawasan.
- c. Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal dalam rangka pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah.
- d. Peningkatan koordinasi dan pembinaan teknis pengawasan.
- e. Peningkatan Operasional pemeriksaan serta penanganan terhadap kasus-kasus aduan masyarakat.
- f. Adanya peningkatan semangat perbaikan kinerja aparatur Pemerintah.

Tantangan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur Inspektorat adalah :



- a. Peningkatan Bimbingan Teknis dan Diklat bagi auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) melalui kerjasama dengan BPKP Perwakilan Jawa Barat maupun Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri;
- b. Merumuskan dan menetapkan Kode Etik maupun Penetapan Angka Kredit bagi Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) di lingkungan Inspektorat Kota Bandung.

Tantangan dalam peningkatan anggaran Inspektorat sebagai Perangkat Daerah khusus adalah :

- a. Peningkatan Tunjangan Kinerja Daerah bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) di lingkungan Inspektorat Kota Cimahi;
- b. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengawasan, melalui perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan, sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan serta fasilitas sarana-prasarana gedung dan kantor yang representatif. ;
- c. Peningkatan alokasi biaya bagi profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
- d. Peningkatan biaya untuk sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;
- e. Peningkatan alokasi biaya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;
- f. Peningkatan biaya untuk fasilitasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- g. Peningkatan biaya kegiatan fasilitasi koordinasi dan konsultasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (ADPPK), fasilitasi Monitoring dan evaluasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Pakta Integritas;

Kontribusi terhadap pelaksanaan revitalisasi tindak lanjut percepatan peningkatan pelayanan publik Kota Cimahi meliputi upaya-upaya yaitu :

- a. Menyusun Sistem dan Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi;
- b. Memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat yang meliputi:
 - Pengaduan tentang penyalahgunaan wewenang;
 - Hambatan dalam pelayanan publik;
 - Pengaduan tentang tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - Pengaduan tentang pelanggaran disiplin pegawai.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Inspektorat Kota Cimahi sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintah daerah, dituntut untuk berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (*welfare state*).

Berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kota Cimahi, yaitu :

1. Pengawasan lebih kepada aspek administrasi, bukan terhadap outcome atau hasil suatu program/kegiatan;
2. Perangkat Daerah menganggap perencanaan bukan suatu kebutuhan mendasar;
3. Tidak ada sanksi tegas terhadap temuan aspek kinerja maupun keuangan daerah;
4. Penyelenggaraan pengawasan belum seragam (diperlukan standar audit yang konsisten);
5. Masih belum tercukupinya jumlah tenaga fungsional auditor. Kondisi eksisting fungsional auditor sebanyak 14 (empat belas) orang dan fungsional pengawas P2UPD sebanyak 3 (tiga) orang. Sementara kebutuhan JFT (Jabatan Fungsional Tertentu) sebanyak 60 orang pegawai.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Cimahi pada tahun 2020 (per bulan Desember) didukung oleh 40 pegawai yang terdiri dari 30 (tiga puluh) orang PNS dan 10 (sepuluh) orang Non PNS (THL). Jumlah pegawai diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan dijelaskan pada tabel 3.1.

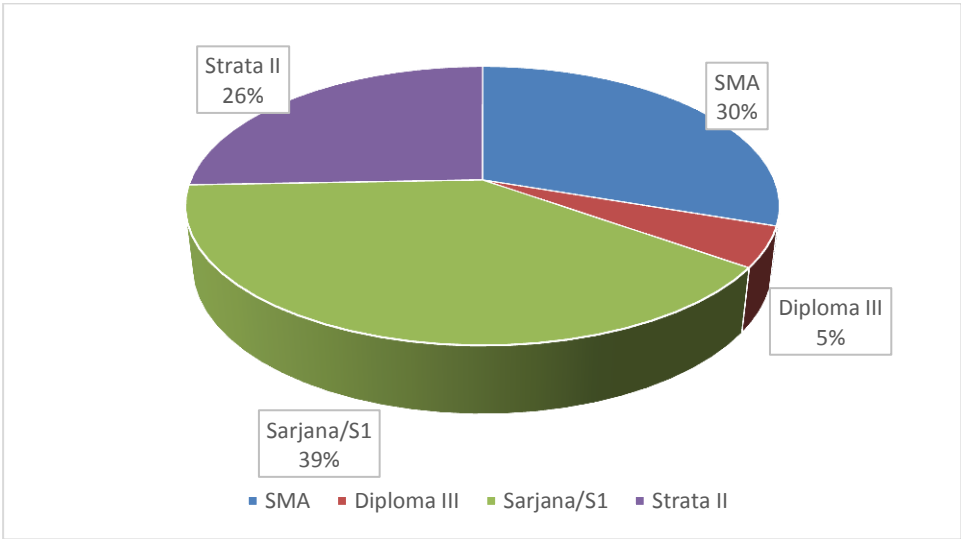
Tabel 3.1

Pegawai Inspektorat berdasarkan kualifikasi pendidikan

No	Pendidikan	PNS	Non PNS	Jumlah
1	SMA	2	11	13
2	Diploma	2	0	2
3	D IV/ Strata 1	17	0	17
4	Strata II	11	0	11
	Jumlah	32	11	43

Gambar Grafik 3.1

Pegawai Inspektorat berdasarkan kualifikasi pendidikan



6. Meningkatnya jumlah temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Cimahi pada tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 8%, atau jumlah temuan tahun 2016 sebanyak 274 temuan dan tahun 2017 sebanyak 295 temuan. Selisih bertambah sebanyak 21 temuan. Faktor penyebab diantaranya terdapat temuan berulang dari obrik (objek pemeriksaan);
7. Program Kerja Pengawas Tahunan (PKPT) Tahun 2012-2017 belum berbasis risiko, sehingga penentuan obyek pemeriksaan belum berdasarkan pada tingkat risiko. Faktor penyebabnya adalah belum memahami seutuhnya mengenai proses penyusunan dan tata cara PKPT berbasis manajemen risiko;
8. Standar dan prosedur pemeriksaan belum seluruhnya tersedia;
9. Kesenjangan antara pelaksanaan bimtek/diklat dengan kebutuhan;
10. Standar kompetensi SDM Inspektorat belum terpenuhi;
11. *Hard and soft control* atas kompetensi dan integritas perlu ditingkatkan.

3.2. Visi Misi Wali Kota Cimahi

Untuk mencapai tujuan pembangunan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Inspektorat sebagai pembina dan pengawas daerah mengemban visi dan misi Wali Kota Cimahi terpilih.

Visi Wali Kota Cimahi yaitu :

“ Mewujudkan Cimahi Baru Maju, Agamis dan Berbudaya”

Penjelasan :

Maju mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu, Kota Cimahi harus terus maju ke depan, menunjukkan peningkatan dan bertambah baik di seluruh aspek kehidupan.

Agamis mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan bermasyarakat.

Berbudaya mengandung pengertian dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam berkebudayaan, untuk mendukung revolusi karakter bangsa yang disesuaikan dengan potensi lokal dan kemampuan sumber daya lokal.

Pelaksanaan Visi yang harus dilaksanakan Inspektorat Kota Cimahi diuraikan dalam pelaksanaan Misi ke-2 Wali Kota Cimahi yaitu :

“Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Professional, Efektif, Efisien, dan Ekonomis Yang Berbasis pada Sistem Penganggaran yang Pro Publik”

Mewujudkan visi misi Wali Kota Cimahi, maka Inspektorat menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat sebagai pembina dan pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, yang menyatakan bahwa Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota;
- d) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e) Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Terdapat faktor-faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi pencapaian visi misi Wali Kota Cimahi di lingkup kerja Inspektorat. Faktor pendorong diantaranya :

- a) Perangkat daerah semakin memahami dan responsif terhadap peran APIP sebagai *quality assurance* pemerintah daerah, dalam memberikan pembinaan berupa jasa konsultasi guna mencapai hasil pemeriksaan yang memadai dan kepercayaan publik makin meningkat;
- b) Telah tersusunnya pranata sebagai norma, standar, dan prosedur pengawasan seperti Internal Audit Charter, PKPT, Standar Audit, POP, Kode Etik.

Sedangkan faktor penghambat diantaranya :

- a) Kurangnya independensi APIP dalam melakukan pemeriksaan;
- b) Anggaran pengawasan belum memadai;
- c) Jumlah dan kompetensi SDM APIP belum memadai;
- d) Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum terwujud secara utuh;
- e) Proses distribusi dan mencatatkan data hasil pemeriksaan belum berbasis sistem elektronik yaitu dalam mengelola Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), dan hasil pemeriksaan antar tim pemeriksa hingga Inspektur;
- f) *Risk register* dan RTP Inspektorat belum disusun;
- g) Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan;
- h) Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana gedung dan kantor yang representatif.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat ini menjadi bahan perumusan isu strategis dan permasalahan Inspektorat Kota Cimahi.

3.3. Isu-isu Strategis Inspektorat

Penguatan peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam pengawas sebagai *quality assurance* untuk mewujudkan *good governance* dan *clean government*. Pengawasan yang dilakukan dalam bentuk pemeriksaan regular, pemeriksaan tertentu, pemeriksaan khusus, monitoring, evaluasi, reviu, verifikator, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Sasaran jangka menengah Inspektorat adalah meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah. Kegiatannya melakukan pengawasan secara berkala terhadap 5 aspek pemeriksaan yaitu keuangan, sarana dan prasarana, SDM, tupoksi, dan metode kerja.

Sedangkan sasaran jangka menengah Renstra Kota Cimahi adalah optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah. Sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang ekonomis, efisien, efektif, akuntabel, dan transparan, serta patuh pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan peran strategisnya, Inspektorat Kota Cimahi menyajikan analisis mengenai isu-isu strategis sebagai tolak ukur dalam menentukan kinerja Inspektorat pada tahun mendatang.

Isu-isu strategis Inspektorat, yaitu :

1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP) Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 adalah CC. sedangkan Tahun 2017 mengalami Peningkatan dengan nilai 60,68 atau predikat B. Nilai yang diperoleh sebagai ukuran semakin meningkatnya akuntabilitas atau pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Daerah. Sebagai perbandingan hasil nilai evaluasi SAKIP pada Kabupaten/Kota seluruh Indonesia ditunjukkan dalam gambar 3.2.

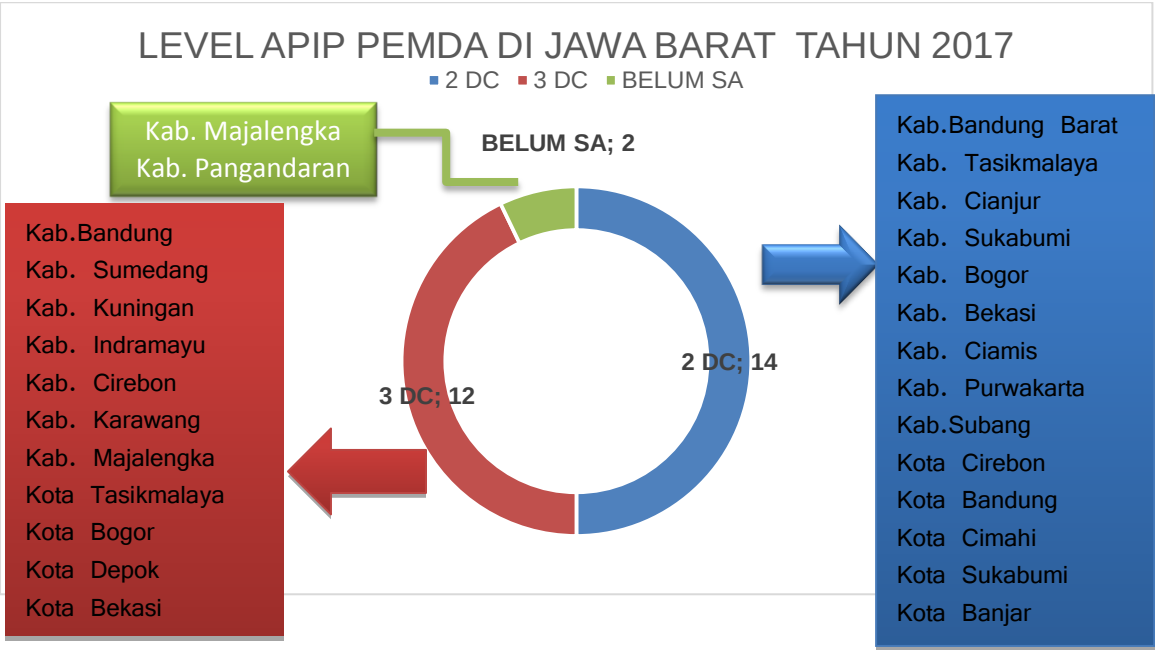
Gambar 3.2
Hasil nilai evaluasi SAKIP Tahun 2016 – 2017



Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

2. Tingkat kapabilitas APIP Inspektorat Kota Cimahi masih berada pada level 1 pada tahun 2016, dan menjadi level 2 DC (Dengan Catatan) pada tahun 2017. Hal ini didasarkan dari laporan hasil penjaminan kualitas (*quality assurance*) BPKP Provinsi Jawa Barat atas pelaksanaan penilaian mandiri kapabilitas APIP Inspektorat Kota Cimahi Nomor LAP-866/PW10/6/2017 Tanggal 7 Desember 2017. Data BPKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 mengenai level kapabilitas APIP dijelaskan dalam gambar 1.3.

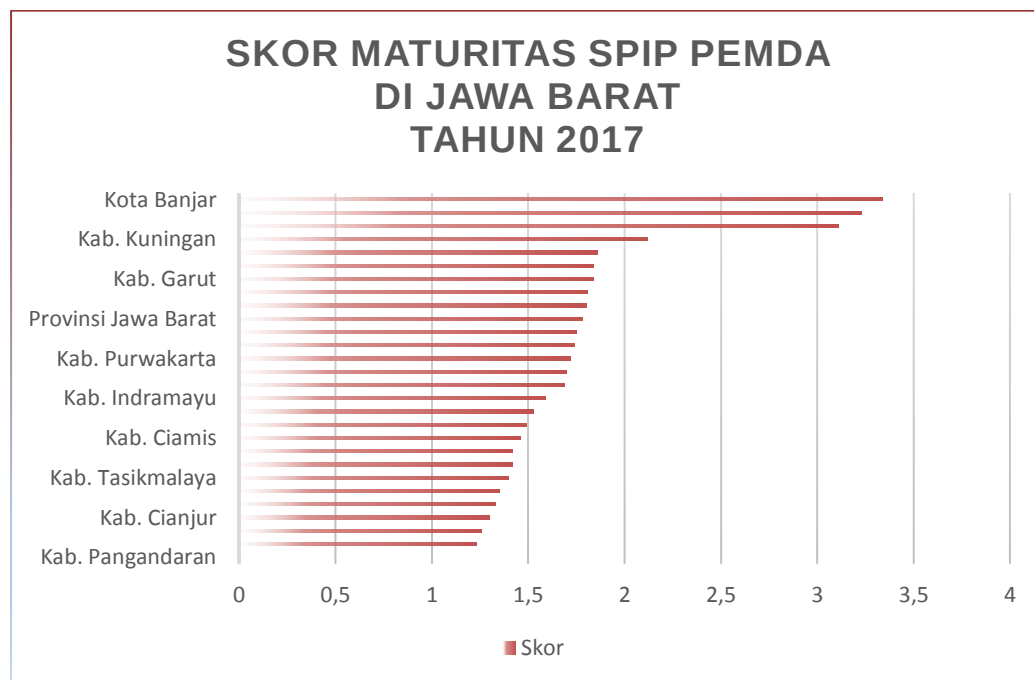
Gambar 3.3
Capaian Kapabilitas APIP Pemda di Jawa Barat Tahun 2017



Sumber : Laporan Kinerja BPKP Provinsi Jawa Barat, 2017

- Masih rendahnya nilai maturitas (kematangan) SPIP Pemerintah Kota Cimahi. Nilai maturitas SPIP Pemerintah Kota Cimahi berada pada posisi ke-26 (dua puluh enam) dengan skor 1,2684 atau terendah ketiga di Jawa Barat setelah Kabupaten Pangandaran (0) dan Kabupaten Bandung (1,2386). Susunan nilai maturitas SPIP Pemda di Jawa Barat Tahun 2017 dijelaskan pada gambar 3.4.

Gambar 3.4
Skor Maturitas SPIP Pemda di Jawa Barat Tahun 2017

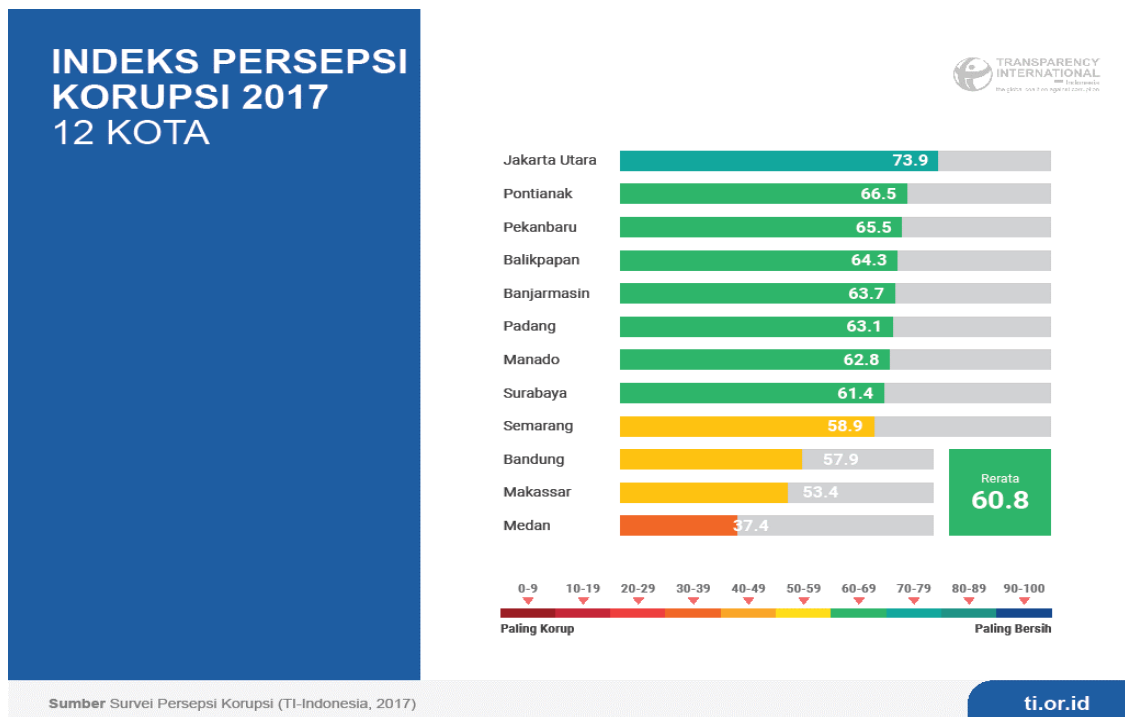


Sumber : Laporan Kinerja BPKP Provinsi Jawa Barat, 2017

- Maraknya kasus OTT oleh KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, menjadi gambaran nyata untuk lebih meningkatkan pengawasan di Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Hal ini didukung dengan posisi *Corruption Perception Index* (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2016 pada angka 37/100 dengan ranking 90/178. CPI dalam dokumen Stranas PPK dijelaskan sebagai Indikator Utama keberhasilan Stranas PPK baik di tingkat nasional maupun di daerah. Berdasarkan survey yang dilaksanakan di 12 Kota di Indonesia oleh Transparency International Tahun 2017, bahwa skala IPK rata-rata Indonesia adalah 60,8, dari 100, dijelaskan dalam gambar 1.5. IPK menggambarkan tingkat korupsi pada level kota berdasarkan persepsi pelaku usaha. Sedangkan untuk mengukur korupsi dan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh institusi publik kepada pelaku usaha melalui indeks pelayanan/ *service performance index* (SPI).

Sedangkan menurut KPK, tingkat korupsi Indonesia tahun 2017 berada di peringkat ketiga se-ASEAN.

Gambar 3.5
IPK Rata-rata Indonesia Tahun 2017



Isu-isu strategis tersebut menjadi latar belakang perumusan perencanaan program dan kegiatan yang terjadi dalam melaksanakan kinerja. Solusi atau upaya yang akan dilakukan adalah :

1. Melengkapi pemenuhan dokumen-dokumen pencapaian leveling kapabilitas APIP level 2 menuju level 3, dengan terus melakukan koordinasi dengan BPKP Provinsi Jawa Barat, dan meningkatkan kompetensi Auditor melalui Pendidikan dan Pelatihan;
2. Memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis pada Perangkat Daerah mengenai Maturitas SPIP. Membentuk Tim Satgas SPIP untuk tingkat Kota dan Tim Satgas Perangkat Daerah untuk melakukan evaluasi diri atas tingkat risiko masing-masing, dan pengendalian yang akan dilakukan. Sehingga Inspektorat memiliki peta *Audit Universe* sebagai bahan penyusunan PKPT serta data awal pemeriksaan;
3. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis manajemen risiko. Perangkat Daerah sebagai obyek pemeriksaan dapat ditentukan berdasarkan tingkat skala prioritas risikonya dan ditinjau dari unsur 3E (Ekonomis, Efisien, dan Efektif);

4. Meningkatkan pengawasan dan melakukan monev secara berkala terhadap Perangkat Daerah atas implementasi rencana aksi PPK;
5. Memenuhi kebutuhan jumlah tenaga fungsional auditor melalui inpassing ataupun pembentukan JFT, dengan merumuskan ratio kebutuhan SDM melalui Analisis Beban Kerja (ABK), Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan E-Kinerja sesuai dengan kompetensi dalam bidang pengawasan;
6. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif kepada Perangkat Daerah dengan memberi ruang diskusi atau jasa konsultasi;
7. Menyusun Program Kerja Pengawas Tahunan (PKPT) berbasis manajemen risiko pada setiap tahun, sehingga obyek pemeriksaan yang ditentukan sesuai tingkat skala prioritas risikonya;
8. Menyusun perencanaan program dan kegiatan Inspektorat yang terukur dan berorientasi hasil (outcome), sehingga kinerja yang dilakukan akan terasa manfaatnya bagi Perangkat Daerah sebagai obyek pemeriksa dan masyarakat;
9. Membuat surat pernyataan sebagai komitmen pemeriksa dan obyek pemeriksa untuk tidak menerima/memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun. Hal ini mencerminkan upaya deteksi dini dalam pencegahan potensi korupsi di lingkungan Internal atau eksternal Inspektorat Kota Cimahi dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government*;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran RPJMD sesuai misi 2 Wali Kota Cimahi yang terkait dengan Renstra Inspektorat yaitu :

Tujuan“ Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah “

Sasaran “Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah“ dan “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah”.

Tujuan dan sasaran RPJMD disinergikan dengan tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kota Cimahi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, ekonomis, efisien, dan efektif yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik dapat tercapai, sebagaimana yang diamanatkan dalam misi 2 Wali Kota Cimahi.

Tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kota Cimahi pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi. Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi. Sedangkan sasaran dapat menspesifikasi indikasi dari keberhasilan kinerja di masing-masing tujuan.

Tujuan dan sasaran Inspektorat tahun 2017 s.d 2022 dijelaskan dalam tabel 4.1.



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Inspektorat
Tahun 2017 – 2022

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah	Opini WTP dari BPK RI			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Meningkatnya implementasi SPIP	Nilai Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP			B	B	B	BB	BB
			Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi LKIP kategori BB	-	7%	25%	50%	100%



NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			B	B	BB	BB	BB
			Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1)Nilai SAKIP Perangkat Daerah; 2)Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum; 3) Persentase ASN yang memiliki kesesuaian potensi	(1) A (80); (2) 100%; (3) 90%	-	-	(1) A (80); (2) 100%; (3) 90%	(1) A (81); (2) 100%; (3) 100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT yaitu *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman). Berbagai kebijakan di tiap-tiap strategi diterjemahkan kedalam program dan kegiatan. Kesenambungan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dijelaskan dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Inspektorat

Visi: Mewujudkan Cimahi Baru Maju, Agamis dan Berbudaya				
Misi II : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik				
Tujuan RPJMD : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah				
Sasaran RPJMD : - Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah				
Strategi RPJMD : Peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil	
			Mengembangkan system pengawasan yang terintegrasi	
	Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah		Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	
			Meningkatkan kapasitas kelembagaan keuangan dan barang milik daerah	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2017-2022), meliputi tujuan, sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja tujuan/sasaran program (outcome) dan kegiatan (output), serta pendanaan. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Kota Cimahi dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi tahun 2017-2022.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Cimahi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Strategis Inspektorat Kota Cimahi. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Kota Cimahi dalam lima tahun mendatang. Rincian program dan kegiatan selama lima tahun sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Inspektorat Kota Cimahi dijelaskan dalam tabel 6.1



Tabel 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INSPEKTORAT KOTA CIMAHI TAHUN 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah				Opini BPK	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP	9.272.166.907	WTP	10.154.990.436	WTP	19.427.157.343	Inspektorat	Kota Cimahi
	Meningkatnya implementasi SPIP			Nilai Maturitas SPIP	Level 1.268	-		-		-		level 3	711.253.000	Level 3	832.640.000	level 3	1.543.893.000	Inspektorat	Kota Cimahi
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai Hasil Pengawasan	43%	-	-	-	-	-	-	70%	384.250.000	80%	566.360.000	80%	950.610.000	Inspektorat	Kota Cimahi
			Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan sesuai PKPT	-	-	-	-	-	-	-	28 Kegiatan	266.400.000	28 Kegiatan	457.260.000	46 Kegiatan	723.660.000	Inspektorat	Kota Cimahi



Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1) Jumlah Perangkat Daerah pemeriksaan kinerja sesuai PKPT; 2) Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai PKPT	1) 4 Perangkat Daerah; 2) 65 Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	1) 5 Perangkat Daerah; 2) 41 Perangkat Daerah	38.500.000	1) 5 Perangkat Daerah; 2) 41 Perangkat Daerah	172.700.000	1) 10 Perangkat Daerah; 2) 82 Perangkat Daerah	211.200.000	Inspektorat	Kota Cimahi
			Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah pemeriksaan aspek keuangan tertentu sesuai PKPT	-	-	-	-	-	-	-	5 Perangkat Daerah	29.350.000	5 Perangkat Daerah	29.350.000	10 Perangkat Daerah	58.700.000	Inspektorat	Kota Cimahi
			Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Perangkat Daerah yang direviu laporan keuangan dan dokumen keuangan lainnya sesuai PKPT	28 Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	94 Perangkat Daerah	58.500.000	94 Perangkat Daerah	41.350.000	188 Perangkat Daerah	99.850.000	Inspektorat	Kota Cimahi



Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah perangkat daerah yang direviu dan dievaluasi kinerja sesuai PKPT	28 Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	78 Perangkat Daerah	44.800.000	93 Perangkat Daerah	43.550.000	171 Perangkat Daerah	88.350.000	Inspektorat	Kota Cimahi
			Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi TLHP BPK RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota Cimahi	28 Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	28 Perangkat Daerah	95.250.000	28 Perangkat Daerah	170.310.000	46 Perangkat Daerah	265.560.000	Inspektorat	Kota Cimahi
			Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan sesuai PKPT	4 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	8 Kegiatan	117.850.000	8 Kegiatan	109.100.000	16 Kegiatan	226.950.000	Inspektorat	Kota Cimahi



Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan penanganan penyelesaian kerugian daerah sesuai PKPT	-	-	-	-	-	-	-	60 Perangkat Daerah	42.150.000	60 Perangkat Daerah	46.150.000	120 Perangkat Daerah	88.300.000	Inspektorat	Kota Cimahi
			Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai PKPT	29 Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	69 Perangkat Daerah	75.700.000	70 Perangkat Daerah	62.950.000	139 Perangkat Daerah	138.650.000	Inspektorat	Kota Cimahi
Meningkat nya Akuntabilit as Kinerja Pemerintah daerah				Nilai SAKIP	B	-	-	-	-	-	-	BB		BB		BB			



Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah			Persentase Perangkat daerah Dengan Hasil Evaluasi LKIP kategori BB	3,57%	-	-	7%	-	25%	-	50%		100%		100%			
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	Level 2	-	-	-	-	-	-	Level 3	327.003.000	Level 3	266.280.000	Level 3	593.283.000	Inspektorat	Kota Cimahi
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah pranata kebijakan yang dihasilkan	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	6.000.000	2 Dokumen	38.000.000	4 Dokumen	44.000.000	Inspektorat	Kota Cimahi
			Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen pendukung kebijakan pengawasan internal	3 Dokumen	-	-	-	-	-	-	4 Dokumen	6.000.000	32 Dokumen	38.000.000	36 Dokumen	44.000.000	Inspektorat	Kota Cimahi



Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	(1) Jumlah fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan; (2) Jumlah asistensi dan pendampingan yang dilaksanakan sesuai PKPT	-	-	-	-	-	-	-	1) 16 Kegiatan; 2) 4 Kegiatan	321.003.000	1) 16 Kegiatan; 2) 4 Kegiatan	228.280.000	1) 16 Kegiatan; 2) 4 Kegiatan	549.283.000	Inspektorat	Kota Cimahi
			Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan saber pungli yang difasilitasi dan fasilitasi korsupgah; Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	-	1) 16 Kegiatan; 2) 2 Kasus	176.100.000	1) 16 Kegiatan; 2) 2 Kasus	171.800.000	1) 32 Kegiatan; 2) 4 Kasus	347.900.000	Inspektorat	Kota Cimahi



Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dan pendampingan penegakan integritas	-	-	-	-	-	-	-	28 Perangkat Daerah	144.903.000	28 Perangkat Daerah	56.480.000	46 Perangkat Daerah	201.383.000	Inspektorat	Kota Cimahi
						-	-	-	-	-	-								
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	-	-	-	-	-	-	A		A		A			
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	-	-	-	-	-	-	A	8.560.913.907	A	9.322.350.436	A	17.883.264.343		



Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1)Nilai SAKIP Perangkat Daerah, 2)Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum, 3) Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	(1) A (80); (2) 100%; (3) 90%	-	-	-	-	-	-	(1) A (80); (2) 100%; (3) 90%	8.560.913.907	(1) A (81); (2) 100%; (3) 100%	9.322.350.436	(1) A (81); (2) 100%; (3) 100%	17.883.264.343		
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	13 Dokumen	-	-	-	-	-	-	13 Dokumen	33.025.000	13 Dokumen	34.020.000	26 Dokumen	67.045.000	Inspektorat	Kota Cimahi



Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	7 Dokumen	-	-	-	-	-	-	7 Dokumen	23.000.000	7 Dokumen	24.000.000	14 Dokumen	47.000.000	Inspektorat	Kota Cimahi
			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	18 Dokumen	-	-	-	-	-	-	18 Dokumen	10.025.000	18 Dokumen	10.020.000	36 Dokumen	20.045.000	Inspektorat	Kota Cimahi
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%		100%			
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	6 Dokumen	7.405.748.407	6 Dokumen	8.108.104.736	12 Dokumen	15.513.853.143	Inspektorat	Kota Cimahi
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	-	-	-	-	-	-	-	32 Orang	7.395.623.407	32 Orang	8.095.504.736	64 Orang	15.491.128.143	Inspektorat	Kota Cimahi



Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	6.600.000	2 Dokumen	6.600.000	4 Dokumen	13.200.000	Inspektorat	Kota Cimahi
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	6 Dokumen	3.525.000	6 Dokumen	6.000.000	12 Dokumen	9.525.000	Inspektorat	Kota Cimahi
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	-	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	239.396.600	12 Bulan	317.838.700	24 Bulan	557.235.300	Inspektorat	Kota Cimahi



Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah set peralatan dan perlengkapan kapan	-	-	-	-	-	-	-	2 Set	77.205.400	5 Set	172.502.100	7 Set	249.707.500	Inspektorat	Kota Cimahi
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	-	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	64.665.400	12 Bulan	51.945.800	24 Bulan	116.611.200	Inspektorat	Kota Cimahi
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	20.378.800	12 Bulan	20.374.800	24 Bulan	40.753.600	Inspektorat	Kota Cimahi
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	77.147.000	12 Bulan	73.016.000	24 Bulan	150.163.000	Inspektorat	Kota Cimahi



Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah set/unit BMD yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-	2 Set/Unit	82.837.000	5 Set/Unit	102.370.000	7 Set/Unit	185.207.000	Inspektorat	Kota Cimahi
			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah set pengadaan mebel	-	-	-	-	-	-	-	1 Set	5.162.000	4 Set	47.370.000	5 Set	52.532.000	Inspektorat	Kota Cimahi
			Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang disewa	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	77.675.000	1 Unit	55.000.000	2 Unit	132.675.000	Inspektorat	Kota Cimahi
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang	-	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	244.877.900	12 Bulan	244.776.000	24 Bulan	489.653.900	Inspektorat	Kota Cimahi



Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	40.800.000	12 Bulan	40.800.000	24 Bulan	81.600.000	Inspektorat	Kota Cimahi
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	204.077.900	12 Bulan	203.976.000	24 Bulan	408.053.900	Inspektorat	Kota Cimahi
			Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan BMD	12 Bulan	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	327.020.000	12 Bulan	272.508.000	24 Bulan	599.528.000	Inspektorat	Kota Cimahi



Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara	3 Unit	-	-	-	-	-	-	3 Unit	124.720.000	3 Unit	120.540.000	6 Unit	245.260.000	Inspektorat	Kota Cimahi
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah set mebel yang dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	3 Set	5.875.000	3 Set	5.000.000	6 Set	10.875.000	Inspektorat	Kota Cimahi
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah set Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	4 Set	93.750.000	4 Set	93.300.000	8 Set	187.050.000	Inspektorat	Kota Cimahi
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	102.675.000	1 Unit	53.668.000	2 Unit	156.343.000	Inspektorat	Kota Cimahi



Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kesesuaian Kompetensi ASN	-	-	-	-	-	-	-	80%		90%		90%			
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya melalui pelayanan administrasi kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	35 Orang	228.009.000	35 Orang	242.733.000	70 Orang	470.742.000	Inspektorat	Kota Cimahi
			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-	45 Set	33.750.000	-	-	45 Set	33.750.000	Inspektorat	Kota Cimahi
			Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-	-	-	-	-	-	35 Orang	194.259.000	35 Orang	242.733.000	70 Orang	436.992.000	Inspektorat	Kota Cimahi



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA

Kinerja penyelenggaran ditunjukkan dengan pengukuran indikator kinerja Inspektorat Kota Cimahi yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, juga sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja harus merupakan kinerja yang dapat dihitung dan diukur, serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam evaluasi tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah, sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Maka Inspektorat Kota Cimahi mengarahkan kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana dijelaskan dalam tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Inspektorat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase PD dengan hasil evaluasi LKIP kategori BB	3,57%	-	7%	25%	50%	100%	100%
2	Nilai Maturitas SPIP	1,26	2	3	3	3	3	3



Tabel 7.2

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		Opini BPK	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP	9.272.166.907	WTP	10.154.990.436	WTP	19.427.157.343	Inspektorat	Kota Cimahi
		Nilai Maturitas SPIP	Level 1.268	-		-		-		level 3	711.253.000	Level 3	832.640.000	level 3	1.543.893.000	Inspektorat	Kota Cimahi
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai Hasil Pengawasan	43%	-	-	-	-	-	-	70%	384.250.000	80%	566.360.000	80%	950.610.000	Inspektorat	Kota Cimahi
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan sesuai PKPT	-	-	-	-	-	-	-	28 Kegiatan	266.400.000	28 Kegiatan	457.260.000	46 Kegiatan	723.660.000	Inspektorat	Kota Cimahi



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1) Jumlah Perangkat Daerah pemeriksaan kinerja sesuai PKPT; 2) Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai PKPT	1) 4 Perangkat Daerah; 2) 65 Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	1) 5 Perangkat Daerah; 2) 41 Perangkat Daerah	38.500.000	1) 5 Perangkat Daerah; 2) 41 Perangkat Daerah	172.700.000	1) 10 Perangkat Daerah; 2) 82 Perangkat Daerah	211.200.000	Inspektorat	Kota Cimahi
	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah pemeriksaan aspek keuangan tertentu sesuai PKPT	-	-	-	-	-	-	-	5 Perangkat Daerah	29.350.000	5 Perangkat Daerah	29.350.000	10 Perangkat Daerah	58.700.000	Inspektorat	Kota Cimahi



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Perangkat Daerah yang direviu laporan keuangan dan dokumen keuangan lainnya sesuai PKPT	28 Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	94 Perangkat Daerah	58.500.000	94 Perangkat Daerah	41.350.000	188 Perangkat Daerah	99.850.000	Inspektorat	Kota Cimahi
	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah perangkat daerah yang direviu dan dievaluasi kinerja sesuai PKPT	28 Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	78 Perangkat Daerah	44.800.000	93 Perangkat Daerah	43.550.000	171 Perangkat Daerah	88.350.000	Inspektorat	Kota Cimahi
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi TLHP BPK RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota Cimahi	28 Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	28 Perangkat Daerah	95.250.000	28 Perangkat Daerah	170.310.000	46 Perangkat Daerah	265.560.000	Inspektorat	Kota Cimahi



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan sesuai PKPT	4 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	8 Kegiatan	117.850.000	8 Kegiatan	109.100.000	16 Kegiatan	226.950.000	Inspektorat	Kota Cimahi
	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan penanganan penyelesaian kerugian daerah sesuai PKPT	-	-	-	-	-	-	-	60 Perangkat Daerah	42.150.000	60 Perangkat Daerah	46.150.000	120 Perangkat Daerah	88.300.000	Inspektorat	Kota Cimahi
	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai PKPT	29 Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	69 Perangkat Daerah	75.700.000	70 Perangkat Daerah	62.950.000	139 Perangkat Daerah	138.650.000	Inspektorat	Kota Cimahi



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		Nilai SAKIP	B	-	-	-	-	-	-	BB		BB		BB			
		Persentase Perangkat daerah Dengan Hasil Evaluasi LKIP kategori BB	3,57%	-	-	7%	-	25%	-	50%		100%		100%			
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	Level 2	-	-	-	-	-	-	Level 3	327.003.000	Level 3	266.280.000	Level 3	593.283.000	Inspektorat	Kota Cimahi



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah pranata kebijakan yang dihasilkan	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	6.000.000	2 Dokumen	38.000.000	4 Dokumen	44.000.000	Inspektorat	Kota Cimahi
	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen pendukung kebijakan pengawasan internal	3 Dokumen	-	-	-	-	-	-	4 Dokumen	6.000.000	32 Dokumen	38.000.000	36 Dokumen	44.000.000	Inspektorat	Kota Cimahi
	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	(1) Jumlah fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan; (2) Jumlah asistensi dan pendampingan yang dilaksanakan sesuai PKPT	-	-	-	-	-	-	-	1) 16 Kegiatan; 2) 4 Kegiatan	321.003.000	1) 16 Kegiatan; 2) 4 Kegiatan	228.280.000	1) 16 Kegiatan; 2) 4 Kegiatan	549.283.000	Inspektorat	Kota Cimahi



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan saber pungli yang difasilitasi dan fasilitasi korsupgah; Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	-	1) 16 Kegiatan; 2) 2 Kasus	176.100.000	1) 16 Kegiatan; 2) 2 Kasus	171.800.000	1) 32 Kegiatan; 2) 4 Kasus	347.900.000	Inspektorat	Kota Cimahi
	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dan pendampingan penegakan integritas	-	-	-	-	-	-	-	28 Perangkat Daerah	144.903.000	28 Perangkat Daerah	56.480.000	46 Perangkat Daerah	201.383.000	Inspektorat	Kota Cimahi
				-	-	-	-	-	-								
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	-	-	-	-	-	-	A		A		A			



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	-	-	-	-	-	-	A	8.560.913.907	A	9.322.350.436	A	17.883.264.343		
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1)Nilai SAKIP Perangkat Daerah, 2)Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum, 3) Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	(1) A (80); (2) 100%; (3) 90%	-	-	-	-	-	-	(1) A (80); (2) 100%; (3) 90%	8.560.913.907	(1) A (81); (2) 100%; (3) 100%	9.322.350.436	(1) A (81); (2) 100%; (3) 100%	17.883.264.343		



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	13 Dokumen	-	-	-	-	-	-	13 Dokumen	33.025.000	13 Dokumen	34.020.000	26 Dokumen	67.045.000	Inspektorat	Kota Cimahi
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	7 Dokumen	-	-	-	-	-	-	7 Dokumen	23.000.000	7 Dokumen	24.000.000	14 Dokumen	47.000.000	Inspektorat	Kota Cimahi
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	18 Dokumen	-	-	-	-	-	-	18 Dokumen	10.025.000	18 Dokumen	10.020.000	36 Dokumen	20.045.000	Inspektorat	Kota Cimahi
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%		100%			



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	6 Dokumen	7.405.748.407	6 Dokumen	8.108.104.736	12 Dokumen	15.513.853.143	Inspektorat	Kota Cimahi
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	-	-	-	32 Orang	7.395.623.407	32 Orang	8.095.504.736	64 Orang	15.491.128.143	Inspektorat	Kota Cimahi
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	6.600.000	2 Dokumen	6.600.000	4 Dokumen	13.200.000	Inspektorat	Kota Cimahi



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	6 Dokumen	3.525.000	6 Dokumen	6.000.000	12 Dokumen	9.525.000	Inspektorat	Kota Cimahi
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	-	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	239.396.600	12 Bulan	317.838.700	24 Bulan	557.235.300	Inspektorat	Kota Cimahi
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah set peralatan dan perlengkapan	-	-	-	-	-	-	-	2 Set	77.205.400	5 Set	172.502.100	7 Set	249.707.500	Inspektorat	Kota Cimahi



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	-	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	64.665.400	12 Bulan	51.945.800	24 Bulan	116.611.200	Inspektorat	Kota Cimahi
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	20.378.800	12 Bulan	20.374.800	24 Bulan	40.753.600	Inspektorat	Kota Cimahi
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	77.147.000	12 Bulan	73.016.000	24 Bulan	150.163.000	Inspektorat	Kota Cimahi
	Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah set/unit BMD yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-	2 Set/Unit	82.837.000	5 Set/Unit	102.370.000	7 Set/Unit	185.207.000	Inspektorat	Kota Cimahi



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah set pengadaan mebel	-	-	-	-	-	-	-	1 Set	5.162.000	4 Set	47.370.000	5 Set	52.532.000	Inspektorat	Kota Cimahi
	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang disewa	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	77.675.000	1 Unit	55.000.000	2 Unit	132.675.000	Inspektorat	Kota Cimahi
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang	-	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	244.877.900	12 Bulan	244.776.000	24 Bulan	489.653.900	Inspektorat	Kota Cimahi
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	40.800.000	12 Bulan	40.800.000	24 Bulan	81.600.000	Inspektorat	Kota Cimahi



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	204.077.900	12 Bulan	203.976.000	24 Bulan	408.053.900	Inspektorat	Kota Cimahi
	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan BMD	12 Bulan	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	327.020.000	12 Bulan	272.508.000	24 Bulan	599.528.000	Inspektorat	Kota Cimahi
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara	3 Unit	-	-	-	-	-	-	3 Unit	124.720.000	3 Unit	120.540.000	6 Unit	245.260.000	Inspektorat	Kota Cimahi



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah set mebel yang dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	3 Set	5.875.000	3 Set	5.000.000	6 Set	10.875.000	Inspektorat	Kota Cimahi
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah set Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	4 Set	93.750.000	4 Set	93.300.000	8 Set	187.050.000	Inspektorat	Kota Cimahi
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	102.675.000	1 Unit	53.668.000	2 Unit	156.343.000	Inspektorat	Kota Cimahi
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kesesuaian Kompetensi ASN	-	-	-	-	-	-	-	80%		90%		90%			



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya melalui pelayanan administrasi kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	35 Orang	228.009.000	35 Orang	242.733.000	70 Orang	470.742.000	Inspektorat	Kota Cimahi
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-	45 Set	33.750.000	-	-	45 Set	33.750.000	Inspektorat	Kota Cimahi
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-	-	-	-	-	-	35 Orang	194.259.000	35 Orang	242.733.000	70 Orang	436.992.000	Inspektorat	Kota Cimahi



Inspektorat Kota Cimahi



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2017-2022 merupakan strategis perencanaan program kerja pengawasan yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparat pengawasan, Inspektorat Kota Cimahi berpedoman pada Rencana Strategis tahun 2017-2022. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja pengawasan pada Inspektorat Kota Cimahi.

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di Inspektorat Kota Cimahi yaitu mewujudkan visi Wali Kota Cimahi **"Mewujudkan Cimahi Baru Maju, Agamis dan Berbudaya"**.

Untuk mencapai Visi Wali Kota Cimahi yang berorientasi hasil dan manfaat, maka perlu kesamaan persepsi didalam implementasinya yaitu :

1. Komitmen yang kuat dari semua lini, terutama yang berkaitan langsung dengan tugas dan tanggung jawab pengawasan.
2. Integritas APIP yang tinggi.
3. Mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas pengawasan.
4. Percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) secara berkelanjutan selama-lamanya 60 hari.
5. Partisipasi masyarakat dalam mencermati adanya penyimpangan ataupun penyalahgunaan wewenang terutama yang berhubungan dengan kepentingan publik.
6. Tersedianya komponen pendukung, diataranya kompetensi SDM, Dana maupun sarana lainnya.





